

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pembelajaran

1. Pengertian Pembelajaran

Menurut Eksiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia (<http://www.wikipedia.com>), pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Surya:7).

Definisi pembelajaran dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam hal ini, masih banyak yang beranggapan bahwa proses pembelajaran itu hanya sebatas membaca, menghafal, untuk sesuatu tujuan. Hal ini tidak salah namun keliru, karena makna belajar tidak sebatas itu saja. Kekeliruan ini menjadi 'kiprah baku' dipersekolahan maupun pendidikan keluarga, sehingga peserta didik tidak dibina,

dikembangkan secara optimal serta membudayakannya sebagai pola belajar selanjutnya.

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. Menurut Yusuf Yudi Prayudi memaparkan bahwa proses pembelajaran adalah sebuah upaya bersama antara dosen dan mahasiswa untuk berbagi dan mengolah informasi dengan tujuan agar pengetahuan yang terbentuk terinternalisasi dalam diri peserta pembelajaran dan menjadi landasan belajar secara mandiri dan berkelanjutan. Maka kriteria keberhasilan sebuah proses pembelajaran adalah munculnya kemampuan belajar berkelanjutan secara mandiri.

Sebuah proses pembelajaran yang baik, paling tidak harus melibatkan tiga aspek, yaitu: aspek psikomotorik, aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek psikomotorik dapat difasilitasi lewat adanya praktikum-praktikum dengan tujuan terbentuknya keterampilan eksperimental. Aspek kognitif difasilitasi lewat berbagai aktivitas penalaran dengan tujuan adalah terbentuknya penguasaan intelektual. Sedangkan aspek afektif dilakukan lewat aktifitas pengenalan dan kepekaan lingkungan dengan tujuan terwujudnya kematangan emosional. Ketiga aspek tersebut bila dapat dijalankan dengan baik akan membentuk kemampuan berpikir kritis dan munculnya kreatifitas. Dua kemampuan inilah yang mendasari *skill problem solving* yang diharapkan wujud pada diri siswa.

Untuk menghasilkan sebuah proses pembelajaran yang baik, maka paling tidak harus terdapat empat tahapan, yaitu:

1. Tahap berbagai dan mengolah informasi, kegiatan di kelas, laboratorium, perpustakaan adalah termasuk dalam aktivitas untuk berbagai dan mengolah informasi.
2. Tahap internalisasi, aktivitas dalam bentuk PR, tugas, paper, diskusi, tutorial, adalah bagian dari tahap internalisasi.
3. Mekanisme balikan, kuis, ulangan/ujian serta komentar dan survey adalah bagian dari proses balikan.
4. Evaluasi, aktivitas *assesment* yang berdasar pada tes ataupun tanpa tes termasuk *asesment* diri adalah bagian dari proses evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan secara *peer review* ataupun dengan survey terbatas.

Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai suatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik.

Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. Duffy dan Roehler (1989) mengatakan apa yang dilakukan guru agar proses belajar

mengajar berjalan lancar, bermoral dan membuat siswa merasa nyaman merupakan bagian dari aktivitas mengajar, juga secara khusus mencoba dan berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum dalam kelas. Sementara itu pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Jadi pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan yaitu, tercapainya tujuan kurikulum.

Gagne dan Briggs (1979:3) mengartikan *instruction* atau pembelajaran ini adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Jadi pengertian mengajar hampir sama dengan pembelajaran namun pada dasarnya berbeda. Dalam pembelajaran kondisi atau situasi yang memungkinkan terjadinya proses belajar harus dirancang dan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh perancang atau guru. Sementara itu dalam keseharian di sekolah-sekolah istilah pembelajaran atau proses pembelajaran sering dipahami sama dengan proses belajar mengajar dimana di dalamnya ada interaksi guru dan siswa dan antara sesama siswa untuk mencapai suatu tujuan yaitu terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku siswa.

2. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran

Pembelajaran mengubah masukan yang berupa siswa yang belum terdidik menjadi siswa yang terdidik. Fungsi sistem pembelajaran ada tiga yaitu fungsi

belajar, fungsi pembelajaran dan fungsi penilaian. Fungsi belajar dilakukan oleh komponen siswa, fungsi pembelajaran dan penilaian (yang terbagi dalam pengelolaan belajar dan sumber-sumber belajar) dilakukan oleh sesuatu di luar diri siswa (Sukadi, 1984:10). Sebelum adanya fungsi belajar, terdapat tiga fase proses belajar siswa. Menurut Bruner, proses belajar siswa terjadi dalam tiga fase yaitu fase informasi, transformasi dan fase penilaian. Sementara itu menurut Wittig (Muhibin, 1995) proses belajar berlangsung dalam tiga tahapan yaitu:

1. *Acquisistion* (tahap perolehan informasi), pada tahap ini si belajar mulai menerima informasi sebagai stimulus dan memberikan respon sehingga ia memiliki pemahaman atau perilaku baru. Tahap *aguasistion* merupakan tahapan yang paling mendasar, bila pada tahap ini kesulitan siswa tidak dibantu maka ia akan mengalami kesulitan untuk menghadapi tahap selanjutnya.
2. *Storage* (penyimpanan informasi), pemahaman dan perilaku baru yang diterima siswa secara otomatis akan disimpan dalam memorinya yang disebut *shortterm* atau *longterm* memori.
3. *Retrieval* (mendapatkan kembali informasi), apabila seorang siswa mendapat pertanyaan mengenai materi yang telah diperolehnya maka ia akan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sistem memorinya untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang dihadapinya. Tahap retrieval merupakan peristiwa mental dalam rangka mengungkapkan kembali informasi, pemahaman, pengalaman yang telah diperolehnya.

Sebenarnya belajar dapat saja terjadi tanpa pembelajaran namun hasil belajar akan tampak jelas dari suatu pembelajaran. Pembelajaran yang efektif ditandai dengan berlangsungnya proses belajar dalam diri siswa. Seseorang dikatakan telah mengalami proses belajar apabila dalam dirinya terjadi perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa dan sebagainya. Dalam pembelajaran hasil belajar dapat dilihat langsung. Oleh karena itu, agar kemampuan siswa dapat dikontrol dan berkembang semaksimal mungkin dalam proses belajar di kelas maka program pembelajaran tersebut harus

dirancang terlebih dahulu oleh para guru dengan memperhatikan berbagai prinsip-prinsip pembelajaran yang telah diuji keunggulannya (Sukadi, 1991:12).

Tujuan pembelajaran merupakan rumusan perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menjadi milik dan harus nampak pada diri siswa sebagai akibat dari perbuatan belajar yang telah dilakukan baik kognitif, afektif dan psikomotor (Ibrahim, 2002: 48). Aspek kognitif erat kaitannya dengan pengetahuan dan pemahaman yang harus diperoleh siswa, aspek afektif erat kaitannya dengan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya aspek psikomotor berkaitan dengan perilaku yang harus ditampilkan para siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Sedangkan dalam KBK 2002, tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Berpusat pada siswa.
2. Belajar dengan melakukan.
3. Mengembangkan kemampuan sosial.
4. Mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan.
5. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah.
6. Mengembangkan kreatifitas siswa.
7. Menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik.
8. Perpaduan kompetensi, kerjasama, dan solidaritas (KBK, 2002:1516).

3. Komponen-komponen yang Mempengaruhi Pembelajaran

Terdapat beberapa komponen yang dapat mempengaruhi pembelajaran, yang baik secara langsung atau tidak langsung terkait dan dapat mempengaruhi proses dan kualitas pembelajaran yang meliputi:

- a. *Raw Input*, adalah kondisi dan keberadaan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran (minat, sikap dan kebiasaan).
- b. *Instrumental Input*, adalah sarana dan prasarana yang terkait dengan proses pembelajaran seperti metode, guru, teknik, media dan bahan pembelajaran.

- c. *Enviromental Input*, adalah situasi dan keberadaan lingkungan baik fisik, sosial maupun budaya dimana kegiatan pembelajaran dilaksanakan.
- d. *Expected Output*, merujuk pada rumusan normatif yang menjadi milik siswa setelah melaksanakan proses pembelajaran (Ibrahim, 2002:51).

Menurut Nana Sudjana (1987:30) komponen pembelajaran terdiri dari:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya bahan atau isi pelajaran yang dibicarakan.
- c. Adanya metode atau alat pelajaran untuk menyampaikan bahan isi pelajaran agar tujuan tercapai.
- d. Adanya penilaian atau evaluasi untuk melihat pencapaian tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa komponen dalam proses belajar adalah adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya guru, adanya peserta didik, adanya bahan atau isi pelajaran, adanya metode dan adanya evaluasi serta situasi yang menunjang proses belajar berlangsung dengan baik. Komponen-komponen pembelajaran ini merupakan satu kesatuan dan harus dilaksanakan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif.

4. Strategi Pembelajaran

Strategi Pembelajaran merupakan garis besar haluan bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam arti ilmu dan kiat di dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan/atau yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (T. Raka Joni, 1992/1993:13).

Strategi Pembelajaran adalah metode dalam arti luas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengayaan, dan remedial yaitu memilih dan menentukan perubahan perilaku, pendekatan prosedur, metode, teknik, dan norma-norma atau batas-batas keberhasilan.

Agar dapat merancang serta melaksanakan strategi pembelajaran yang perlu memperhatikan unsur-unsur strategi dasar atau tahapan langkah berikut:

1. Menetapkan spesifikasi dari kualifikasi perubahan perilaku, tujuan selalu dijadikan acuan dasar dalam merancang dan melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara spesifik dalam arti mengarah kepada perubahan perilaku tertentu dan operasional dalam arti dapat diukur.
2. Memilih pendekatan pembelajaran, suatu cara pandang dalam menyampaikan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran harus dipertimbangkan dan dipilih jalan pendekatan utama yang dipandang paling ampuh, paling tepat, dan paling efektif guna mencapai tujuan.
3. Memilih dan menetapkan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran.
 - Metode merupakan cara yang dipilih untuk menyampaikan bahan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
 - Teknik merupakan cara untuk melaksanakan metode dengan sarana penunjang pembelajaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan belajar untuk mencapai tujuan.
 - ❖ Merancang Penilaian
 - ❖ Merancang Remedial
 - ❖ Merancang Pengayaan

Secara umum strategi pembelajaran dibagi menjadi tiga:

1. Strategi induktif adalah suatu strategi pembelajaran yang memulai dari hal-hal yang khusus barulah menuju hal yang umum.

2. Strategi deduktif adalah suatu strategi pembelajaran yang umum menuju hal-hal yang khusus.
3. Strategi campuran adalah gabungan dari strategi induktif dan deduktif. Adapula strategi regresif yaitu strategi pembelajaran yang memakai titik tolak jaman sekarang untuk kemudian menelusuri balik (ke belakang) ke masa lampau yang merupakan latar belakang dari perkembangan kontemporer tersebut (Widja,1989: 36)

Menurut Gagne dalam (Winkel, 1989, 169-240) mengemukakan ada lima pendekatan yang diistilahkan dengan proses atau jalur belajar yaitu: 1. informasi verbal, 2. kemahiran intelektual, 3. pengaturan kegiatan kognitif, 4. keterampilan motorik dan 5. sikap. Sedang merumuskan tujuan pembelajaran Gagne tetap berpedoman dengan taksonomi Bloom dan kawan-kawan dengan 3 ranah perwujudan pembelajaran.

5. Jenis-jenis Pendekatan Pembelajaran

Ada empat pendekatan yang dikemukakan diantaranya:

1. Pendekatan Informasi

Pendekatan ini menitikberatkan pada cara memperkuat dorongan internal peserta didik untuk memahami dunia ini dengan menggali dan mengorganisasikan data, merasakan adanya masalah dan mengupayakan jalan keluarnya dengan mengembangkan bahasa untuk mengungkapkannya. Yang termasuk pendekatan informasi adalah:

- a. Pendekatan Berpikir Edukatif,
- b. Pendekatan Latihan Inkuiri,

- c. Pendekatan Pencapaian Konsep,
 - d. Pendekatan Pengembangan Kognitif atau Intelektual,
 - e. Pendekatan Pemandu Awal (*Advance Organizer*),
 - f. Pendekatan Memory.
2. *Pendekatan Personal.*
 3. *Pendekatan Interaksi Sosial*
 - a. Pendekatan Investigasi Kelompok (*Group Investigation*)
 - b. Pendekatan Latihan Laboratoris (*Laboratory Training*)
 - c. Pendekatan Penelitian Yurisprudensi (*Jurisprudential Inquiry*)
 - d. Pendekatan Penelitian Sosial (*Social Science Inquiry*)
 4. *Pendekatan Sistem Perilaku (Behavioral System)*

Pendekatan ini meliputi sekelompok pendekatan pembelajaran yang beranjak dari teori-teori belajar sosial. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan modifikasi perilaku (*behavioral modification*), terapi perilaku (*behavioral therapy*), dan sibernetika (*cybernetics*). Dasar pikiran pendekatan ini berorientasi pada sistem komunikasi yang mengoreksi sendiri, yang memodifikasi perilaku dalam hubungannya dengan tugas-tugas yang dijalankan sebaik-baiknya.

Tujuan pendekatan ini adalah mengubah perilaku nyata yang nampak. Perubahan perilaku didasarkan pada prinsip stimulus-respon, yang termasuk kategori pendekatan sistem perilaku adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Belajar Tuntas (*Master Learning*) dan Pengajaran Langsung (*Direct Instruction*)

Penerapan yang paling umum dari sistem perilaku untuk inencapai tujuan tujuan akademis, mengambil bentuk belajar tuntas (*mastery learning*) dan

pengajaran langsung (*direct instruction*) memiliki ciri-ciri yang serupa dengan pengajaran berprogram (*programmed instruction*) yang dikembangkan oleh Skinner, yaitu:

1. Bahan-bahan yang akan dikaji terbagi dalam bentuk unit, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks.
2. Bahan-bahan yang disajikan kepada peserta didik diorganisasikan secara perseorangan dengan menggunakan berbagai media.
3. Proses belajar dilakukan oleh peserta didik secara bertahap menurut kecepatan masing-masing dengan melalui unit-unit pembelajaran itu, yang kemudian diberikan tes untuk menguji keberhasilannya.
4. Jika seseorang peserta didik ternyata belum dapat menguasai unit itu, maka ia dapat mengulanginya sampai dapat menguasai tujuan unit dengan baik.

b. Pendekatan Belajar Kontrol Diri (*Learning Self Control*)

Skinner, Bapak teori pengolahan perilaku dalam konsepnya tentang *operant conditioning*, telah memberikan sumbangan yang besar dan luas dalam pendekatan ini. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berperilaku di berbagai kelompok sosial.

Pendekatan belajar kontrol/pengawasan diri bertolak dari keyakinan bahwa perilaku peserta didik merupakan hasil belajar (*learned*). Karena itu peserta didik harus diberi kemudahan untuk belajar bagaimana bertanggung jawab secara moral atas lingkungan personal dan sosial memahami dirinya secara utuh.

Pendekatan ini digunakan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan menghindarkan peserta didik dari keengganan untuk melibatkan diri dalam kesempatan belajar yang tersedia secara umum. Peserta didik yang suka mengganggu temannya, dapat belajar secara lebih produktif untuk berhubungan dengan temannya. Kemudian peserta didik yang memiliki rasa takut

terhadap mata pelajaran tertentu, dapat belajar bagaimana menghilangkan rasa takut itu dengan membangun perasaan yang tegar (*affirmatif*).

c. Pendekatan Latihan Keterampilan dan Pengembangan Konsep (*Training for Skills and Concept Development*)

Ada dua macam pendekatan yang dikembangkan atas dasar pemikiran teori sibernetika mengenai perilaku kelompok, yaitu: pendekatan teori ke praktik dan simulasi. Pendekatan teori ke praktik, memadukan suatu keterampilan dengan penampilan, praktik, umpan balik dan latihan sampai dengan tahap dikuasainya keterampilan itu. Misal, jika ketrampilan sosial yang menjadi tujuan, dimulai dengan menjelaskan keterampilan itu dan mendemonstrasikan cara penggunaannya. Kemudian diberi latihan dengan pemberian koreksi sebagai umpan balik dan selanjutnya peserta didik menerapkannya dengan bimbingan teman atau gurunya.

Pendekatan simulasi, dirancang dari gambaran mengenai kehidupan nyata sehari-hari. Suasana yang mirip dengan lingkungan yang sebenarnya sengaja diciptakan sebagai situasi belajar, atau dengan cara membangun alat tiruan sebagai simulator. Dalam pendekatan ini nampak jelas proses pencapaian tujuan simulasi dan bergerak secara nyata sampai tujuan itu dikuasai.

d. Pendekatan Latihan Asertif (*Assertive Training*)

Tujuan dari pendekatan ini adalah terciptanya komunikasi yang integratif dan jujur. Karena itu pendekatan ini beranjak dari masalah-masalah komunikasi. Peserta didik didorong melakukan komunikasi dengan orang lain mengenai

perasaan dan tujuannya. Mereka tetap dapat menjaga perasaan orang lain itu, sehingga tidak merasa tersinggung.

Pendekatan ini dapat dipakai untuk menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan etis dalam berbagai tingkat kelas. Untuk dapat memilih sekaligus menetapkan pendekatan pembelajaran yang diuraikan di atas dengan cermat dan tepat, maka harus dipahami karakteristiknya masing-masing secara utuh. Di samping memperhatikan, tujuan pembelajaran, bahan keilmuan/pembelajaran dan karakteristik peserta didik terutama kemampuan intelektualnya. Karena dalam proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran tidak ada satupun pendekatan pembelajaran yang dapat diandalkan sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang serba manjur. Sehubungan dengan itu maka pengalaman para guru dalam menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran selama proses pembelajaran, akan memungkinkan para guru lebih inovatif dan adaptif terhadap pendekatan pembelajaran tertentu.

Dari pendekatan pembelajaran yang dipilih untuk menyajikan suatu bahan pembelajaran itulah keragaman metode pembelajaran akan ditentukan. Dengan keragaman metode pembelajaran yang dapat diterapkan selama proses pembelajaran, maka akan nampak kegiatan belajar (*learning activities*) yang beragam dilakukan oleh peserta didik. Dengan kegiatan belajar yang beragam ini dimungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar (*learning experiences*) yang banyak macamnya. Kondisi proses pembelajaran yang demikian itu, baik langsung maupun tidak langsung para guru benar-benar telah memperhatikan peserta didiknya tanpa kecuali (Saripuddin, 1989:132-146).

6. Mekanisme Pembelajaran

Aspek penting lainnya dalam pembelajaran yaitu mekanisme pembelajaran. Adanya mekanisme pembelajaran ini bertujuan agar kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dimana mekanisme pembelajaran ini dibagi dalam beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi serta tahap tindak lanjut. Tahapan-tahapan pembelajaran ini tersusun sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan ini diawali dengan kesiapan guru dalam penguasaan bidang keilmuan yang menjadi kewenangannya, merupakan modal bagi terlaksananya proses pembelajaran yang baik. Guru yang profesional dituntut untuk memiliki persiapan dan penguasaan cukup memadai, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam merancang program pembelajaran yang akan disajikan. Persiapan proses pembelajaran menyangkut pula penyusunan desain (rancangan) proses pembelajaran yang akan diselenggarakan. Adapun desain tersebut meliputi:

1. Tujuan apa yang hendak dicapai, yaitu bentuk-bentuk tingkah laku apa yang diinginkan dapat dicapai atau dapat dimiliki oleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran.
2. Bahan pelajaran yang dapat mengantarkan siswa mencapai tujuan.
3. Bagaimana proses pembelajaran yang akan diciptakan oleh guru agar siswa mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
4. Bagaimana menciptakan dan menggunakan alat dan mengetahui atau mengukur apakah tujuan itu tercapai atau tidak.

b. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan proses pembelajaran menggambarkan dinamika kegiatan belajar siswa yang dipandu dan dibuat dinamis oleh guru. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam mengaplikasikan metodologi dan pendekatan pembelajaran secara tepat. Kompetensi profesional dari guru tersebut perlu dikombinasikan dengan kemampuan dalam memahami dinamika perilaku dan perkembangan yang dialami oleh siswa.

Adapun keberhasilan proses pembelajaran banyak tertumpu pada sikap dan belajar siswa, baik perorangan maupun kelompok. Tersedianya sumber belajar dengan memanfaatkan media pembelajaran secara tepat merupakan kondisi positif yang mampu mendorong dan memelihara kegiatan belajar siswa yang proaktif dan efektif.

Dalam melaksanakan pengajaran harus berpegang pada apa yang tertuang dalam perencanaan yang dibuat. Situasi yang dihadapi guru dalam melaksanakan pengajaran mempunyai pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar, situasi pengajaran itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1) Faktor guru

Setiap guru memiliki pola mengajar berbeda yang tercermin dalam tingkah laku pada waktu melaksanakan pengajaran yang dipengaruhi oleh pandangannya sendiri tentang mengajar, konsep-konsep psikologis yang digunakan serta kurikulum yang dilaksanakan, juga tidak terlepas dari berbagai persyaratan yang

perlu dimiliki oleh seorang guru supaya berbagai persoalan hasil pendidikan yang menyimpang dapat dicegah.

Keterkaitan tugas guru dengan sejumlah persoalan tersebut di atas, menyadarkan bahwa tugas guru tidak sebatas menyampaikan materi pelajaran dengan menampilkan hasil tes yang tinggi, lebih dari itu guru ternyata mempunyai tanggung jawab besar terhadap aspek perilaku siswa. Hasil belajar yang seutuhnya itu bukan sebatas kecerdasan intelektual saja, tetapi ada beberapa kecerdasan lainnya yang harus dimiliki oleh siswa, seperti kecerdasan sosial, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Dalam proses pembelajaran itu, banyak menyangkut aspek manusiawinya, seperti sikap, nilai, perasaan, motivasi, kepribadian, ketauladan, demokrasi dan banyak lagi. Dengan demikian, kemampuan menjadi sangat penting dimiliki oleh setiap guru agar terwujud prestasi belajar yang tinggi.

Tabrani Rusyan (1997:32) menjelaskan bahwa untuk mencapai keberhasilan proses pembelajaran, guru harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga kependidikan termasuk guru, seperti dikemukakan *Asian Institut for Teacher Educator* Tabrani Rusyan (1990: 17-20) adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi Pribadi
 - (1) Memiliki Kemampuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama.
 - (2) Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi.
 - (3) Memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi.
 - (4) Memiliki pengetahuan tentang estetika.
 - (5) Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan.
 - (6) Setia terhadap harkat dan martabat manusia.

- b. Kompetensi Profesional, mencakup kemampuan dalam hal:
- a) Menguasai bahan, meliputi:
 - (1) Menguasai bahan pelajaran dan kurikulum sekolah.
 - (2) Menguasai bahan pendalaman/aplikasi bahan pelajaran.
 - b) Mengelola program belajar mengajar, meliputi:
 - (1) Merumuskan tujuan instruksional.
 - (2) Mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar.
 - (3) Memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat.
 - (4) Melaksanakan program belajar mengajar.
 - c) Mengelola kelas yang meliputi:
 - (1) Mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran.
 - (2) Menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi.
 - d) Menggunakan media dan sumber, meliputi:
 - (1) Mengenal, memilih dan menggunakan media.
 - (2) Membuat alat-alat bantu pelajaran yang sederhana.
 - (3) Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses belajar mengajar.
 - (4) Mengembangkan laboratorium.
 - (5) Menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar.
 - (6) Menggunakan lingkungan sekolah, latihan dan *micro teaching* dalam program PPL
 - e) Menguasai landasan-landasan kependidikan.
 - f) Mengelola interaksi belajar mengajar.
 - g) Menilai peserta didik untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran.
 - h) Mengenal fungsi layanan dan bimbingan, meliputi:
 - (1) Mengenal fungsi program layanan dan bimbingan.
 - (2) Menyelenggarakan program layanan dan bimbingan di sekolah.
 - i) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, meliputi :
 - (1) Mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah.
 - (2) Menyelenggarakan administrasi sekolah.
 - j) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna kepentingan pengajaran.
 - k) Memiliki sifat-sifat yang mendorong kemajuan pendidikan.
 - l) Memahami peserta didik.
 - m) Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam proses belajar mengajar.
 - n) Mampu meneliti masalah-masalah pendidikan.
 - o) Mengembangkan teori dan konsep dasar pendidikan.
 - p) Merencanakan program pendidikan.
 - q) Menerapkan berbagai keahlian bidang pendidikan.
 - r) Menilai dan menguji proses pendidikan.
 - s) Menguasai, melaksanakan dan menilai ilmu yang menyangkut bidang studi.
 - t) Melaksanakan kurikulum yang berlaku.

- u) Membina dan mengembangkan kurikulum di sekolah dan di luar sekolah.
- v) Memiliki dan memperbaiki kurikulum sekolah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemajuan zaman.
- w) Memahami dan melaksanakan konsep mengajar individual.

c. Kompetensi Sosial

Kemampuan sosial tenaga kependidikan adalah salah satu daya atau kemampuan tenaga kependidikan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik serta kemampuan untuk mendidik, membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Adapun kompetensi sosial tenaga kependidikan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Tenaga kependidikan sebagai petugas kemasyarakatan
 - Aspek normatif kependidikan, yaitu untuk menjadi tenaga kependidikan yang baik tidak cukup digantungkan kepada bakat, kecerdasan, kecakapan saja, tetapi juga harus beritikad baik sehingga hal ini bertautan dengan norma yang dijadikan landasan dalam melaksanakan tugas.
 - Pertimbangan sebelum memilih jabatan tenaga kependidikan.
 - Mempunyai program yang menjurus untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dan kemajuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan di masyarakat
- (3) Tanggung jawab sosial tenaga kependidikan.

Peranan tenaga kependidikan di sekolah tidak lagi terbatas untuk memberikan pelajaran, tetapi juga tenaga kependidikan harus memikul tanggung jawab yang lebih banyak, yaitu bekerjasama dengan pengelola pendidikan lainnya di dalam lingkungan masyarakat. Ketiga kompetensi pokok tersebut merupakan modal dasar bagi tenaga kependidikan khususnya guru ketika menjalankan tugas profesinya.

Terdapat beberapa peranan guru dan siswa dalam pengajaran dan pembelajaran yaitu:

- Peranan Guru:

1. Guru tidak menganggap siswa sebagai kertas kosong yang perlu diisi dengan fakta dan pengetahuan baru.

2. Guru berperanan sebagai pembimbing/fasilitator.
3. Guru berperanan sebagai pengurus bilik darah untuk menangani hal-hal disiplin siswa dengan sempurna.

Kompetensi pribadi merupakan kemampuan yang ada kaitannya dengan pokok guru baik sebagai pendidik dan pengajar, sedangkan kompetensi ada kaitannya dengan kemampuan menjalin komunikasi dengan masyarakat.

2) Faktor siswa

Setiap siswa mempunyai keragaman dalam hal kecakapan maupun kepribadian yang dapat mempengaruhi terhadap situasi yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Terdapat beberapa peranan siswa, yaitu:

1. Siswa tidak menganggap guru sebagai pembekal maklumat tetapi sebagai sumber pengetahuan untuk membantu mereka mencari maklumat dan menggalakkan mereka berfikir serta berkomunikasi.
2. Siswa bertanggung jawab terhadap segala usaha untuk mencari berbagai cara untuk memproses maklumat dan menyelesaikan masalah.
3. Siswa berdisiplin dalam membuat keputusan sendiri untuk melibatkan diri dalam aktivitas pembelajaran.

3) Faktor kurikulum

Pengertian kurikulum dalam kegiatan ini Irnenggambarkan pada isi atau pelajaran dan pola interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian baik bahan pelajaran maupun pada interaksi guru siswa harus beraneka ragam, supaya dapat menimbulkan situasi yang bervariasi di dalam proses pembelajaran.

4) Faktor lingkungan

Lingkungan meliputi ruangan, tata ruang dan berbagai situasi fisik yang ada di sekitar kelas atau di sekitar tempat berlangsungnya proses belajar mengajar yang dapat mempengaruhi situasi belajar. Memelihara suasana pembelajaran yang dinamis dan menyenangkan merupakan kondisi esensial yang perlu tercipta dalam setiap proses pembelajaran. Dalam hal ini perlu ditanamkan persepsi positif pada setiap diri siswa, bahwa kegiatan belajar merupakan peluang yang sangat berharga untuk memperoleh kesuksesan dan kemajuan sebagaimana yang dicita-citakan.

c. Tahap evaluasi

Yang dimaksud dengan evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengungkap taraf keberhasilan proses pembelajaran, khususnya untuk mengukur hasil belajar siswa. Melalui evaluasi dapat diketahui efektifitas proses pembelajaran dan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi yang baik adalah alat ukur yang tepat (*valid*), dapat dipercaya (*reliable*) dan memadai (*adequate*). Pengukuran tingkat keberhasilan siswa dapat dilakukan dengan cara menggunakan tes tertulis (*written test*), tes lisan (*oral test*) ataupun tes praktek (*performance test*). Evaluasi merupakan laporan (akhir) dari proses pembelajaran khususnya laporan tentang kemajuan prestasi belajar siswa. Evaluasi secara otomatis merupakan pertanggungjawaban guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

d. Tahap tindak lanjut

Tahap tindak lanjut dari proses pembelajaran dapat dipilah menjadi: promosi dan rehabilitasi. Dimana promosi adalah penetapan untuk melangkah dan

peningkatan lebih lanjut akan keberhasilan belajar siswa. Bentuk promosi bisa berupa melanjutkan bahasan atas materi pembelajaran atau keputusan tentang kenaikan kelas. Sedangkan rehabilitasi adalah perbaikan atas kekurangan yang telah terjadi dalam proses pembelajaran, khususnya apabila terjadi tingkat keberhasilan siswa yang kurang memadai.

Adapun bentuk dari rehabilitasi dalam proses pembelajaran dikenal dengan istilah pengajaran remedial (*remedial teaching*). Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat penguasaan atau memperbaiki kekurangan yang telah dialami oleh siswa tertentu dalam kegiatan belajar sebelumnya. Bentuk pengajaran remedial berupa pelajaran tambahan, penambahan tugas-tugas, memperpanjang waktu belajar terhadap siswa-siswa tertentu yang mengalaminya. Pengajaran remedial, diakhiri dengan pelaksanaan ujian perbaikan atas kekurangan yang dialami siswa sebelumnya.

Dengan demikian jelas bahwa dalam kegiatan pembelajaran ini setidaknya guru menjalankan tiga macam tugas utama, yakni: a) Merencanakan, meliputi: Tujuan apa yang hendak dicapai; Bagaimana proses belajar mengajar yang akan diciptakan oleh guru agar siswa mencapai tujuan secara efektif dan efisien; Bagaimana menciptakan, menggunakan alat dan mengetahui atau mengukur apakah tujuan itu tercapai atau tidak; b) Melaksanakan pengajaran sesuai perencanaan yang dibuat, dan c) Memberikan tindak lanjut.

B. Tinjauan Tentang Pembelajaran PKn

1. Pengertian dan Hakikat PKn

PKn atau *civic Education* adalah program pendidikan pembelajaran yang secara programatik-prosedural berupaya memanusiakan (*humanizing*) dan membudayakan (*civilizing*) serta memberdayakan (*empowering*) manusia/anak didik (dari dan kehidupannya) menjadi warga negara yang baik sebagaimana tuntutan keharusan/yuridis konstitusional bangsa/negara yang bersangkutan (Djahiri, 2006:9).

Secara imperatif Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas merupakan landasan yuridis formal mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Dalam Pasal 37 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta perguruan tinggi.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Udin S. Winataputra (2001:7) dalam disertasinya berjudul “*Jati Diri PKn Sebagai Wahana Sistem Pendidikan Demokrasi*”. Dalam disertasi tersebut terdapat istilah PKn pada dasarnya digunakan dalam pengertian luas seperti “*citizenship education*” atau “*education for citizen*” yang mencakup PKn di dalam lembaga pendidikan formal dan di luar sekolah yang berupa program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warganegara Indonesia yang cerdas, dan baik.

Sedangkan dalam Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2006:2) ditegaskan bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial-budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Hal senada diungkapkan pula oleh Somantri (2001:299) antara lain sebagai berikut:

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orangtua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas terdapat tiga ciri khas yang dimiliki mata pelajaran PKn, yakni meliputi pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan. Ketiga hal tersebut merupakan bekal bagi peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan multidimensional yang memadai untuk menjadi warga negara yang baik.

Adapun isi dari pengetahuan (*body of knowledge*) dari mata pelajaran PKn diorganisasikan secara interdisipliner dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, hukum, tata negara, psikologi, dan berbagai kajian lainnya yang berasal dari kemasyarakatan, nilai-nilai budi pekerti, dan hak asasi manusia dengan penekanan kepada hubungan antar warga negara dengan warga negara,

warga negara dan pemerintah negara, serta warga negara dan warga dunia. Hal ini diperkuat oleh (Somantri, 1969:7) yang mengemukakan bahwa:

Mata pelajaran *Civics* atau kewarganegaraan, pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selain memiliki karakteristik, PKn juga memiliki misi, seperti yang diungkapkan oleh Sapriya (Civics, 2005:321) bahwa misi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

- PKn sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekatan politik (*political literacy*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi.
- PKn sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum dan kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.
- PKn sebagai pendidikan nilai (*value education*), yang berarti melalui PKn diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri siswa, sehingga mendukung bagi upaya *nation and character building*.

Secara paradigma, *citizenship education* juga memiliki visi sosio-pedagogis mendidik warganegara yang demokratis dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup konteks pendidikan formal dan pendidikan non-formal, seperti yang secara konsisten diterapkan di UK (QCA, 1998; Kerr, 1999).

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memuat nilai-nilai luhur yang terkandung pada, nilai pusat (*central values*) bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Selain itu PKn merupakan, pendidikan yang secara rasional dan ilmiah menyiapkan peserta didik agar berperilaku sesuai dengan

agama dan budaya, serta dapat berinteraksi dengan orang lain dalam konteks yang luas.

Secara epistemologis, Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi *Citizenship Education* yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional masing-masing negara. Namun, secara umum tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah agar setiap warga negara menjadi warrga negara yang baik (*to be good citizenships*), yakni warga yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Selain itu, kedudukan PKn dalam proses demokratisasi adalah dalam rangka transformasi nilai-nilai demokrasi sebagaimana pernah dikemukakan oleh Alexis de Toqueville (dalam Branson, 1998) bahwa “*each generation is a new people that must acquire the knowledge, learn the skills, and develop dispositions or traits of privates and public character that undergird a constitutional democracy*”. Setiap generasi adalah orang-orang baru yang harus memperoleh pengetahuan, berlatih dan mengembangkan watak dan karakter pribadi maupun publik yang mengarah pada terwujudnya demokrasi konstitusional.

Winataputra (1999) mengemukakan bahwa di Indonesia sebenarnya istilah *Civics* dan *Civic Education* telah muncul masing-masing dengan nama: (a) Kewarganegaraan (1957); (b) *Civics* (1962); (c) Pendidikan Kewarganegaraan (1968). Semenjak masa pemerintahan Orde Baru, mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan masuk dalam kurikulum sekolah tahun 1968. Secara kontinu terdapat beberapa kali perubahan nama Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembelajaran kurikulum sekolah. Pada pasca Orde Baru dimana terjadi perubahan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan semakin mendapat tempat yang kokoh dalam perundang-undangan negara RI.

Dalam konteks Indonesia saat ini, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran dalam KBK tahun 2004 yang menggantikan mata pelajaran PPKn dalam kurikulum sebelumnya. Dasar pemikiran pengajaran mata pelajaran baru ini adalah bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia diharapkan akan dapat membantu siswa menjadi warga negara yang memiliki komitmen dan konsistensi terhadap pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Selanjutnya esensi mata pelajaran ini difokuskan pada pengembangan diri dalam berbagai aspek, seperti agama, sosial-budaya, bahasa, moral, etika, dan etnisitas agar siswa menjadi warga negara yang cerdas dan terampil. Dengan kata lain, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Standar Isi Pendidikan Nasional tahun 2006 antara lain dijelaskan pula bahwa kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian

dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Selain itu mata pelajaran ini juga diharapkan mampu menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memiliki peranan sangat penting dalam mendidik para siswa menjadi warga, negara yang demokratis. Sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Survei nasional tahun 1999 yang dilakukan oleh CICODEI/*Center for Indonesian Civic Education (CICED & USIA/USIS, 2000)*, misalnya telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan mutu Pendidikan Kewarganegaraan. Diantaranya bahwa Pendidikan Kewarganegaraan semestinya menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai dan cita-cita demokratis yang dibutuhkan masyarakat sipil Indonesia. Selain itu, upaya perbaikan Pendidikan Kewarganegaraan juga dilakukan dengan perbaikan (revisi) kurikulum, antara lain melalui penerapan dan penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sejak tahun 2004.

2. Fungsi dan Tujuan PKn

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan atau mata pelajaran yang memiliki tujuan utama untuk mendidik siswa agar menjadi warga

negara yang baik (...to be a good citizenships), demokratis dan bertanggung jawab. Program Pendidikan Kewarganegaraan ini memandang siswa dalam kedudukannya sebagai warga negara, sehingga program-program, kompetensi atau materi yang diberikan kepada peserta didik diarahkan untuk mempersiapkan mereka mampu hidup secara fungsional sebagai warga masyarakat dan warga negara yang baik.

Somantri (2001:166) memberikan pemaparan mengenai fungsi PKn sebagai berikut:

Usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar terjadi internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi tujuan pendidikan nasional, yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari.

Adapun tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah mengembangkan kompetensi sebagai berikut:

- Memiliki kemampuan berfikir secara rasional, kritis dan kreatif, sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan.
- Memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab.
- Memiliki watak dan kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Rumusan tersebut sejalan dengan aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Aspek-aspek kompetensi tersebut mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Hal tersebut sejalan dengan konsep Benjamin S. Bloom tentang pengembangan kemampuan siswa yang mencakup

ranah kognitif, psikomotor, dan afektif.

Watak atau karakter kewarganegaraan sesungguhnya merupakan materi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dimensi ini dapat dipandang sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya.

Dengan demikian seorang warga negara pertama-tama perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, memiliki keterampilan intelektual maupun partisipatif, dan pada akhirnya pengetahuan serta keterampilan itu akan membentuk suatu karakter atau watak yang mapan, sehingga menjadi sikap dan kebiasaan sehari-hari. Watak yang mencerminkan warga negara yang baik itu misalnya sikap religius, toleran, jujur, adil, demokratis, taat hukum, menghormati orang lain, memiliki kesetiakawanan sosial dan lain-lain.

Sedangkan tujuan mata pelajaran PKn menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Landasan Perkembangan *Civic Education*

Dalam pasal 3 Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), secara imperatif digariskan bahwa “Pendidikan

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Karena itu idealisme pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis merupakan misi suci (*mission sacre*) dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara khusus, seperti dapat dicermati pada penjelasan pasal 37 ayat (1) “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Dalam teks itu Pendidikan Kewarganegaraan pada, dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Semua imperatif atau keharusan itu menuntut perlunya penghayatan baru kita terhadap Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan praksis pendidikan yang utuh, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan “*civic intelligence*”, “*civic participation*” dan “*civic responsibility*” sebagai anak bangsa dan warga negara Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*”. Konfigurasi atau kerangka sistematis dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut:

- a. PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.
- b. PKn secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.
- c. PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

4. Ruang Lingkup Mata Pelajaran PKn

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tara tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga negara, meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila meliputi: Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

5. Rangkaian Kesatuan PKn

Dalam kajian internasional tentang PKn David Kerr yang dilakukan oleh “*School Curriculum and Assessment Authority (SCAR)*” melalui “*National Foundation for Educational Research in England and Wales (ATER)*” dengan salah satu tugasnya untuk mengadakan “*international review of curriculum and assessment framework*” di 16 negara yakni: Australia, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Hungaria, Italia, Jepang, Korea, Belanda, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Amerika Serikat. Studi ini bertujuan: “*to provide comparative tables and factual summaries in specific areas of interest; and to provide detailed information on specific areas to enable CQA (Curriculum Qualification Authority) to evaluate the national curriculum and assessment frameworks in England*”, dan dengan salah satu temanya adalah “*the citizenship education*”.

Studi tentang “*the citizenship education*” ini dirancang untuk memperkaya pengertian dan wawasan para pengambil keputusan pendidikan di Inggris tentang “*citizenship education*”, khususnya mengenai “*curriculum aims, organization, and structure; teaching and learning approaches; teacher specialization and teacher training; use of textbooks and other resources; assessment arrangements; and current and future developments*” (Kerr,1999: 1), pada jenjang pendidikan

anak usia 15 sampai 16 atau 18 tahun, atau sama dengan pendidikan TK sampai dengan SMU.

Secara operasional istilah “*citizenship education*” dalam studi itu didefinisikan sebagai berikut: “*Citizenship or civics education is construed to encompass the preparation of young people for their roles and abilities as citizens and in particular, the role of education (through ling, teaching, and learning) in that preparatory process* atau “*citizenship or civics education*” yaitu PKn dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

Sesuai dengan studi Kerr tersebut ditemukan bahwa cara pengorganisasian PKn dalam kurikulum di berbagai negara sampel tersebut bervariasi mengikuti alternatif pendekatan “*separate, integrated, and cross-curricular*”. Dalam pendekatan “*separate*”, seperti di Jepang, Korea, dan Singapura untuk SD, PKn diajarkan sebagai suatu mata pelajaran atau suatu aspek. Sedangkan dalam pendekatan “*integrated*”, seperti di Australia (semua tingkat), Kanada (semua tingkat), Prancis (semua tingkat), Jerman (semua tingkat), Hongaria (semua tingkat), Italia (semua tingkat), Jepang (semua tingkat), Belanda (semua tingkat), Zelandia Baru (semua tingkat), Singapura (semua tingkat), Spanyol (semua tingkat), Swedia (semua tingkat), Swiss (semua tingkat), dan USA: Kentucky (semua tingkat). PKn diajarkan sebagai bagian dari suatu mata pelajaran terpadu “*social sciences*” atau “*social studies*”, atau dikaitkan dengan mata pelajaran lain.

Sementara itu, dalam pendekatan “*cross-curricular cular*”, yang hanya dipraktekkan di Inggris, PKn tidaklah secara khusus sebagai suatu mata pelajaran atau suatu topik, melainkan secara sistemik dimasukkan ke dalam keseluruhan tatanan kurikulum dengan memasukkannya ke dalam mata pelajaran yang ada.

Jika dilihat dari sifat dan statusnya dalam kurikulum tampak ada yang bersifat: (1) wajib bagian dari program inti, seperti untuk SD di Prancis, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Negeri Belanda, Zelandia Baru, dan Singapura; dan untuk SLTP/SMA di Prancis, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Belanda, Zelandia Baru, Singapura, dan Amerika Serikat; (2) tidak wajib, seperti untuk SD di Inggris, Australia, Kanada, Jerman, Spanyol dan Swiss; dan untuk SLTP/SMA di Inggris, Australia, Kanada, Jerman, Spanyol, dan Swiss; (3) bukan pelajaran inti seperti untuk semua tingkat di Swedia. Dalam konteks itu, PKn Indonesia termasuk ke dalam pendekatan “*separate*” dengan sifat dan kedudukan “wajib bagian dari program inti” untuk semua tingkat.

Selain itu diperoleh pula deskripsi tentang jati diri PKn, studi Kerr juga melaporkan temuan jati diri tersebut ternyata dipengaruhi oleh faktor-faktor: “*historical tradition, geographical position, socio-political structure, economic system, and global trends*”. Studi itu juga mengidentifikasi adanya suatu “*Citizenship education continuum*” MINIMAL dan MAXIMAL. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Rangkaian Kesatuan Pendidikan Kewarganegaraan:

<i>MINIMAL</i>	<i>MAXIMAL</i>
<i>thin</i>	<i>thick</i>
<i>exclusive</i>	<i>inclusive</i>
<i>elitist</i>	<i>activist</i>
<i>civics education</i>	<i>citizenship education</i>
<i>formal</i>	<i>participative</i>
<i>content led</i>	<i>process led</i>
<i>knowledge based</i>	<i>values based</i>
<i>didactic transmission</i>	<i>interactive transmission</i>
<i>easier to achieve</i>	<i>more difficult to achieve</i>
<i>and measure in</i>	<i>and measure in</i>
<i>practice</i>	<i>practice</i>

a. Rangkaian Kesatuan PKn Maksimal

Pala kontinum PKn maksimal ditandai dengan “*thick, inclusive, activist, citizenship education, participative, process-led, values-based, interactive interpretation, more difficult to achieve and measure in practice*”. Maksudnya adalah didefinisikan secara luas, mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, kombinasi pendekatan formal dan informal, dilabeli “*citizenship education*”, menitikberatkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas, hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil belajar.

Sejalan dengan konseptualisasi dalam bentuk kontinum tersebut, Kerr (1999, 15-16) mengkonseptualisasikan tiga pendekatan PKn, yaitu (1) “*Education About citizenship*” yang memusatkan perhatian pada: “*...providing students with sufficient knowledge and understanding of national history and the structures and processes of government and political life*”; (2) “*Education Through citizenship*” yang menitikberatkan pada prinsip: “*... involves student learning by doing, through active, participative experiences in the school or in local community and*

beyond. Proses belajar seperti itu diyakini memiliki potensi untuk “... *reinforces the knowledge component*”; dan (3) *Education For citizenship* yang mencakup kedua pendekatan (1 dan 2) yang menitikberatkan pada proses “... *equipping students with a set of tools (knowledge and understanding, skills and attitudes, values and dispositions) which enable them to participate actively and sensibly in the roles and responsibilities they encounter in their adult lives*. Pendekatan ini mengaitkan “*citizenship education*” dengan “*the whole education experience of students*”.

Dengan menggunakan kedua konseptualisasi tersebut, Kerr (1999: 16) menyimpulkan bahwa di negara-negara Eropa Tengah, Eropa Selatan dan di Eropa utara, dan USA dinilai lebih mendekati titik “*Maksimal*”, “*education For citizenship*” (Winataputra dan Budimansyah, 2007:5-6).

b. Rangkaian Kesatuan PKn Minimal

PKn pada titik minimal ditandai oleh: “*thin, exclusive, elitist, civics education, formal, content led, knowledge-based, didactic transmission, easier to achieve and measure in practice*. Maksudnya adalah didefinisikan secara sempit, hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran PKn bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran, dan hasilnya mudah diukur.

6. Metode Pembelajaran PKn

Menurut Djahiri (1995/1996) terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yaitu: “Ceramah bervariasi, metode ekspositori, pengajaran konsep, tanya jawab,

partisipatori, diskusi dan kelompok belajar, kejar-korban, inkuiri dan pemecahan masalah serta *Value Clarification Technique (VCT)*”.

Metode adalah langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga sumber belajar dalam suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Dalam membelajarkan siswa guru dituntut untuk menggunakan metode yang bervariasi agar tidak menimbulkan kejenuhan dan kebosanan pada siswa.

Kaitannya dengan PKn, Kosasih Djahiri dalam bukunya Dasar-dasar Umum Metodologi dan Nilai Pengajaran Nilai – Moral PVCT (1995/1996) memaparkan beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKn yakni: ceramah, metode ekspositori, metode pengajaran konsep, metode tanya jawab, metode partisipatori, metode diskusi dan kelompok belajar, metode inkuiri dan pemecahan masalah serta pengajaran VCT (*Value Clarification Technique*). Pengajaran VCT adalah pola pengajaran yang membelajarkan potensi/dunia afektif peserta didik sekaligus pula mempribadikan isi dan pesan (*meart*, nilai dan moral, jiwa dan semangat) yang tersirat dalam suatu kajian.

Sementara itu, dengan diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi, pembelajaran PKn harus mengupayakan menggunakan pendekatan proses dan pendekatan belajar kontekstual dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan karakter warga Negara.

7. Media Pembelajaran PKn

Menurut Djahiri (1995/1996): “Media pengajaran ditentukan oleh metoda dan kualifikasi bahan materi pelajaran”, adapun jenis dan bentuk medianya

dikategorikan ke dalam beberapa macam yang terdiri dari:

- a. Yang bersifat Materil (kebendaan) berupa alat peraga, benda cetak (buku, majalah, Koran, dll).
- b. Yang bersifat Immaterial (tidak terwujud) seperti iklim, keadaan kehidupan (kaya, miskin, dll).
- c. Yang bersifat personal (manusia seperti tokoh, pahlawan, narasumber, dll).

Berkaitan dengan hal tersebut, Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas (2003: 6) menyatakan bahwa:

Dalam pembelajaran kewarganegaraan dapat menggunakan berbagai media yang mempunyai potensi untuk menambah wawasan dan konteks belajar serta meningkatkan hasil belajar. Slide, film, radio, televisi dan komputer yang dilengkapi CD-ROM dan hubungan internet dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai informasi tentang isu-isu internasional dan aktivitas kewarganegaraan di negara-negara lain.

8. Evaluasi dalam PKn

Menurut Ralph Tyler (1950) dalam Arikunto (2006: 3) menjelaskan bahwa: “Penilaian merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauhmana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai”.

Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas (2003: 5) bahwa:

Penilaian dalam mata pelajaran Kewarganegaraan diarahkan untuk mengukur pencapaian indikator hasil belajar. Penilaian dapat menggunakan model penilaian berdasarkan perbuatan (*performance based assessment*) atau juga dikenal dengan penilaian otentik (*authentic assessment*).

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan penilaian secara keseluruhan program mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Sedangkan penilaian merupakan proses pengambilan keputusan secara kualitatif tentang nilai sesuatu: baik, burak, kurang, jelek dan sebagainya. Dengan demikian yang dimaksud dengan penilaian hasil belajar adalah proses

penentuan nilai terhadap hasil belajar yang ingin dicapai siswa. Evaluasi dalam pembelajaran PKn merupakan bagian yang terpadu dari proses belajar mengajar dan bukan suatu bagian tersendiri serta bukan kegiatan akhir dari suatu pendidikan.

Evaluasi PKn secara garis besar terdiri atas teknik tes dan non tes atau melalui prosedur formal dan informal. Dalam prosedur formal atau penggunaan tes objektif dan essay. Menurut Wahab (1986: 187) yang umum digunakan dalam tes objektif antara lain meliputi:

- a. Pilihan ganda.
- b. Menjodohkan.
- c. Melengkapi essay.
- d. Benar salah.
- e. Mengenai/bereaksi terhadap situasi kritis dan problematik.

Sedangkan yang tergolong teknik non tes atau prosedural informal menurut Wahab (1986: 149) yaitu:

- a. Teknik observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan seksama serta pencatatan secara tematis.
- b. Daftar cocok merupakan suatu daftar pertanyaan dimana responden tinggal memberikan tanda cek (√) pada tempat yang telah disediakan.
- c. Skala penilaian (*Rating Scale*) merupakan suatu teknik untuk menggambarkan suatu nilai yang dimanifestasikan dalam bentuk angka terhadap hasil pertimbangan.
- d. Kuesioner adalah daftar pertanyaan atau butir-butir yang meminta kepada responden untuk memberi tanda atau cek dengan cara tertentu.
- e. Wawancara, teknik ini berguna untuk menilai kemajuan siswa dalam pengembangan nilai moral.

Menurut Sundawa (2003:7-9), pada pelaksanaan proses evaluasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Beberapa prinsip umum yang perlu diartikan dalam proses evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn):
 - 1) Objektivitas
 - 2) Representatif
 - 3) Keseksamaan
 - 4) Keterbukaan
 - 5) Kejelasan
- b. Sedangkan beberapa prinsip khusus yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan:
 - 1) Evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan lebih banyak untuk kepentingan siswa dibandingkan untuk kepentingan guru.
 - 2) Hasil evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bukan merupakan sesuatu yang final akan tetapi hanya bersifat sementara.

Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, evaluasi atau penilaian dilakukan tidak hanya mengukur pada tingkat penguasaan sejumlah bahan ajar saja, tetapi dilakukan secara, menyeluruh, berkesinambungan dan multi sistem melalui bentuk penilaian proses dan penilaian hasil.

Penilaian proses bertujuan untuk basil belajar sementara selama proses belajar berlangsung. Penilaian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai seberapa jauh peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dalam satu kali pertemuan, sedangkan penilaian hasil bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penguasaan peserta didik terhadap materi atau kompetensi tertentu. Penilaian ini dilakukan secara perodik setelah selesainya satu pokok bahasan atau gabungan beberapa pokok bahasan, dan secara berkala dilakukan pada setiap, akhir semester.

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan penilaian secara keseluruhan program mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Sedangkan penilaian merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar (perorangan atau

kelompok), yang diperoleh melalui pengukuran. Penilaian bertujuan untuk menganalisis atau menjelaskan unjuk kerja/prestasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang terkait, dan mengefektifkan penggunaan informasi tersebut untuk mencari tujuan pendidikan (Depdiknas, 2002:2).

Pembelajaran PKn yang bersifat multi aspek, menuntut PKn untuk lebih hati-hati dalam menentukan evaluasi yang tepat bagi siswa. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diterapkan dalam evaluasi PKn. Seperti yang diungkapkan oleh Kosasih Djahiri (1995:53).

- a. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk pengukuran tingkat keberhasilan belajar siswa melainkan juga tingkat keberhasilan/kegagalan mengajar, program reduksi, dan momentum membaca kualifikasi atau jati dirinya (siswa), keluarga dan lingkungan kehidupannya.
- b. Evaluasi jangan hanya diartikan THB/TPB atau ulangan yang cenderung administratif formal yakni mencari dan menentukan nilai/angka melainkan momentum pengukuran diri untuk reduksi atau remedial.

Evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan secara garis besar terdiri atas teknik tes dan non tes atau melalui prosedur formal dan informal. Dalam prosedur formal atau penggunaan tes objektif dan essay. Menurut Azis Wahab (1986:187) yang umum digunakan dalam tes objektif antara lain meliputi:

- a. Pilihan ganda
- b. Menjodohkan
- c. Melengkapi Essay
- d. Benar salah
- e. Mengenai/bereaksi terhadap situasi kritis dan problematik

Sedangkan yang tergolong teknik non tes atau prosedural, menurut Abdul Azis Wahab (1986:149) yaitu:

- a. Teknik observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan seksama serta pencatatan secara tematis.

- b. Daftar cocok, merupakan suatu daftar pertanyaan dimana responden tinggal memberikan tanda cek (\surd) pada tempat yang telah disediakan.
- c. Skala penilaian (*rating scale*), merupakan suatu teknik untuk menggambarkan suatu nilai yang dimanifestasikan dalam bentuk angka terhadap hasil pertimbangan.
- d. Kuesioner adalah daftar pertanyaan atau butir-butir yang meminta kepada responden untuk memberi tanda atau cek dengan cara tertentu, keduanya dapat dipergunakan untuk mengevaluasi minat, sikap dan nilai anak dan membantu guna memperoleh gambaran yang jelas tentang peranan dan pengalaman siswa.
- e. Wawancara, teknik ini berguna untuk menilai kemajuan siswa dalam pengembangan nilai moral.

Selain itu, penilaian dalam mata pelajaran PKn dapat menggunakan model penilaian berdasarkan perbuatan (*performance-based assessment*). Hal ini senada dengan yang dikemukakan Depdiknas (2003:6) berikut ini:

“Penilaian dalam mata pelajaran PKn diarahkan untuk mengukur pencapaian indikator hasil belajar. Penilaian dapat menggunakan model penilaian berdasarkan perbuatan (*performance-based assessment*) atau juga dikenal dengan penilaian otentik. Penilaian perbuatan atau otentik dapat menggunakan beberapa teknik berikut ini : (1) Catatan kegiatan, (2) Catatan anekdot, (3) Skala sikap, (4) Catatan tindakan, (5) Koleksi pekerjaan, (6) Tugas individu, (7) Tugas Kelompok, (8) Diskusi, (9) Wawancara, (10) Catatan pengamatan, (11) Peta perilaku, (12) Portofolio, (13) Pengukuran sosiometrik, (14) Tes buatan guru, (15) Tes standar prestasi, dan (16) Tes standar psikologis”.

Jadi berdasarkan uraian di atas penilaian dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat menggunakan model penilaian berdasarkan perbuatan yang dilakukan siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Perbuatan tersebut dapat dilihat baik melalui sikap dalam mengikuti pelajaran, daya tangkap pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan lain-lain.

C. Tinjauan Tentang Model Pembelajaran Berbasis Portofolio

1. Pengertian Portofolio

Portofolio berasal dari bahasa Inggris "*portofolio*" yang artinya dokumen atau surat-surat. Dapat juga diartikan sebagai kumpulan kertas berharga dari suatu pekerjaan tertentu. Pengertian portofolio di sini adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan (Arnie Fajar, 2002:47).

Model ini pertama kali digunakan di California pada tahun 1992 dan kemudian dikembangkan menjadi satu program nasional oleh *Center For Civic Education* (CCE) dan Konferensi Nasional Badan Pembuat Undang-Undang Negara pada tahun 1995. *Project Citizen* adalah satu *instructional treatment* yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil (*civil society*). Program tersebut mendorong para siswa untuk terlibat secara aktif dengan organisasi-organisasi pemerintah dan masyarakat sipil untuk memecahkan satu persoalan di sekolah atau di masyarakat dan untuk mengasah kecerdasan sosial dan intelektual yang penting bagi kewarganegaraan demokratis yang bertanggung jawab.

Nama lengkap paket pembelajaran ini adalah "*We The People... Project Citizen*" yang merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar kepada para peserta didik tentang langkah-langkah dan metode yang digunakan di dalam proses politik. Karena memang sifatnya yang generik dan universal, model ini telah diadopsi di berbagai negara di luar Amerika

Serikat seperti Albania, Argentina, Bosnia Herzegovina, Brazil, Cina, Kolumbia, Kroasia, Republik Ceko, Republik Dominika, Hongaria, Indonesia, Irlandia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Libanon, Lithuania, Macedonia, Meksiko, Mongolia, Nikaragua, Nigeria, Oman, Palestine, Polandia, Rumania, Rusia, Slovakia, dan Uruguay. Di masing-masing negara yang mengadopsi, paket belajar yang dikembangkan oleh CCE ini diterjemahkan ke dalam bahasa nasionalnya masing-masing dengan adaptasi sebagian dari isinya sesuai dengan konteks masing-masing negara tersebut. Seperti dilaporkan oleh masing-masing anggota delegasi negara tersebut dalam “*Summer Seminar International Civic Education Program* di Palermo, Italia, 17-22 Juni 1999”, paket tersebut ternyata bisa diterapkan dan mendapat sambutan yang luas baik dari dunia persekolahan maupun pemerintah masing-masing negara, dan pada masing-masing negara tersebut kini siap memasuki tahap diseminasi yang lebih luas lagi. Fenomena tersebut dapat dipahami karena memang sifat generik dari paket “*We the People... Project Citizen*” yang pada dasarnya dikembangkan dari model pendekatan berpikir kritis atau reflektif sebagaimana dirintis oleh John Dewey (1900) dengan paradigms “*How We Think*”-nya atau model “*Reflective Inquiry*”-nya Barr, dkk (1978).

Pendekatan pembelajaran yang disarankan untuk dikembangkan adalah yang berorientasi pada proses berpikir kritis dan pemecahan masalah atau “*critical thinking-oriented and problem solving-oriented model*”. Salah satu model pembelajaran yang kini secara internasional diterapkan secara adaptif adalah model “*We the People... Project Citizen*” (CCE:1992-2000). Model ini dikenal

sebagai “*A portfolio-based civic education project*” yang dirancang untuk mempraktekkan salah satu hak warganegara, yakni “... *the right to try to influence the decision people in his/her government make about all of those problems*” (CCE:1998), dengan cara melibatkan peserta didik melalui suatu “praktik-belajar” yang secara prosedural menerapkan langkah-langkah sebagai berikut.

1. *Identify a problem to study* (Mengetahui masalah untuk dipelajari);
2. *Gather Information* (Mengumpulkan informasi);
3. *Examine Solution* (Menguji pemecahan);
4. *Develop students’ own public policy* (Mengembangkan kebijakan publik peserta didik sendiri);
5. *Develop an Action Plan* (Mengembangkan rencana tindakan).

Jadi, tujuan *Project Citizen* adalah untuk memotivasi dan memberdayakan para siswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis melalui penelitian yang intensif mengenai masalah kebijakan publik di sekolah atau di masyarakat tempat mereka berinteraksi.

Project Citizen memberikan kesempatan kepada para siswa untuk ambil bagian dalam pemerintahan dan masyarakat sipil sambil mempraktikkan berpikir kritis, dialog, debat, negosiasi, kerja sama, kesantunan, toleransi, membuat keputusan, dan aksi warganegara (*civic action*) yakni melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara untuk kepentingan bersama (CCE, 1998:1).

Untuk Indonesia, model ini telah diadaptasi menjadi model “Praktik-Belajar Kewarganegaraan ... Kami Bangsa Indonesia” (PKKBI) yang diujicobakan oleh *Center For Indonesian Civic Education* (CICED) bekerjasama

dengan *Center for Civic Education* (CCE), Calabasas, USA dan Kanwil Depdiknas Jawa Barat pada bulan Juli 2000-Januari 2001 di enam SMP Negeri di sekitar Bandung, Jawa Barat, yakni SMP Negeri 4, 13, dan 34 Bandung; SMP Negeri 1 Lembang; SMP Negeri 1 Cikeruh (sekarang SMP Negeri 1 Jatinangor); dan SMP Negeri 1 Tanjungsari Sumedang. Pada saat bersamaan, di lingkungan masyarakat sekolah dan masyarakat yang lebih luas seyogyanya, juga dikondisikan untuk menjadi “*spiral global classroom*” (CICED, 1999a:7). Dengan demikian, kesenjangan yang melahirkan kontroversi atau paradoks antara yang dipelajari di sekolah dengan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dapat diminimumkan. Hal inilah yang ingin dijumpai oleh model “*We the People... Project Citizen*” atau “Praktik Belajar Kewarganegaraan... Kami Bangsa Indonesia”.

Kemudian PKKBI juga secara nasional dirintis penerapannya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Proyek Pendidikan Kewarganegaraan dan Budi Pekerti di 70 SMP dan SMA yang tersebar di 15 propinsi tahun 2001-2002, dan melalui program kerjasama Depdiknas dengan *Center for Civic Education Indonesia* (CCEI) diujicobakan pada 250 SMP yang tersebar di 12 propinsi pada tahun 2002. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun berikutnya, (2003-2006) kegiatan rintisan menjangkau 64 kabupaten/kota dengan cakupan 512 SD, 512 SMP, dan 512 SMA. Dengan demikian dalam kurun waktu 6 (enam) tahun, (2001-2006) rintisan telah menjangkau 1.786 sekolah (SD, SMP dan SMA). Yang masih perlu digali adalah seberapa tinggi tingkat keberlanjutan dari rintisan tersebut.

Rintisan implementasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan. “*best practices*” atau praktek terbaik dari penerapan model di SD, SMP dan SMA dengan cara mengkaji kelayakan pedagogic (*pedagogical applicability*) dari model tersebut dilihat dari penguasaan model oleh guru, dukungan sistemik dan managerial dari kepala sekolah, dan dinamika konteks sosial-budaya setempat. Bertolak dari “*best practices*” tersebut diharapkan dapat dirancang lebih lanjut pengembangan dan penerapan secara meluas dari model pembelajaran itu dalam konteks upaya peningkatan kualitas Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah.

2. Landasan Pemikiran Model Pembelajaran Portofolio

Sebagai suatu inovasi pembelajaran portofolio dilandasi oleh beberapa landasan pemikiran. Menurut Dasim Budimansyah (2000:4) ada tiga landasan pemikiran dikembangkan model portofolio diantaranya sebagai berikut:

a. Empat Pilar Pendidikan

Empat pilar pendidikan sebagai landasan model portofolio adalah *learning to do, learning to know, learning to be dan learning to live together*, yang dicanangkan UNESCO. Dalam proses pembelajaran tidak seharusnya memposisikan peserta didik sebagai pendengar ceramah guru atau dosen laksana botol kosong yang diisi dengan ilmu pengetahuan. Peserta didik harus diberdayakan agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya (*learning to do*) dengan meningkatkan interaksi dengan lingkungan fisik, sosial, maupun budaya, sehingga mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia di sekitarnya (*learning to know*). Diharapkan hasil interaksi dengan lingkungan itu dapat membangun pengetahuan dan kepercayaan

dirinya (*learning to be*) kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu atau kelompok yang bervariasi (*learning to live together*) akan membentuk kepribadiannya untuk memahami kemajemukan atau melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan hidup.

b. Pandangan Konstruktivisme

Pandangan konstruktivisme sebagai filosofi pendidikan mutakhir menganggap semua peserta didik mulai dari usia taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi memiliki gagasan atau pengetahuan tentang lingkungan dan peristiwa/gejala lingkungan di sekitarnya, Meskipun gagasan/pengetahuan ini sering naif dan miskonsepsi. Mereka senantiasa mempertahankan gagasan/pengetahuan naif ini secara kokoh. Dipertahankan karena gagasan/pengetahuan ini terkait dengan (terstruktur kognitif). Dengan demikian, arsitek pengubah gagasan peserta didik adalah peserta didik sendiri dan guru atau dosen hanya berperan sebagai 'fasilitator dan penyedia kondisi' supaya proses belajar yang sesuai dengan filosofi konstruktivisme antara lain diskusi, pengujian dan hasil penelitian sederhana, demonstrasi dan peragaan prosedur ilmiah, dan kegiatan praktis lain yang memberi peluang peserta didik untuk mempertajam gagasannya.

c. *Democratic Teaching*

Democratic teaching adalah suatu bentuk upaya menjadikan sekolah sebagai pusat kehidupan demokrasi melalui proses pembelajaran yang demokratis. Secara singkat *democratic teaching* adalah proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung

tinggi keadilan, menerapkan persamaan kesempatan, dan memposisikan peserta didik sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran perlu adanya suasana yang terbuka, akrab, dan saling menghargai. Sebaiknya perlu menghindari suasana yang kaku, dan penuh dengan ketegangan, dan sarat dengan perintah dan instruksi yang membuat peserta didik pasif, tidak bergairah, cepat bosan dan mengalami kelelahan.

3. Tujuan Pembelajaran PKn Berbasis Portofolio

Ada lima kerangka gagasan pendidikan dan politik yang menjadi alasan dan latar belakang keberadaan model pembelajaran PKn berbasis portofolio (*Project Citizen*): *Pertama*, bahwa demokrasi itu pada prinsipnya adalah sistem pemerintahan sendiri dan oleh karena itu perlu melibatkan warga negara secara aktif dan cerdas dalam kehidupan berkebangsaan. Pentingnya keterlibatan warga negara ini terutama adalah partisipasinya dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan demikian, para siswa dapat belajar mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik dan mengembangkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan watak (*dispositions*) yang penting bagi keterlibatannya dalam kehidupan berkebangsaan. *Kedua*, para siswa diarahkan belajar bagaimana melibatkan diri dalam kehidupan kewarganegaraan. Siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar dan mengalami sendiri dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan. Lebih jauh lagi, isi pendidikan kewarganegaraan diperkaya ketika para siswa berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan kewarganegaraan. Para ahli pendidikan IPA menyatakan bahwa untuk

meningkatkan pengalaman belajar, siswa memperoleh kesempatan melalui pengalaman belajar di laboratorium. Sedangkan, menurut para ahli Pendidikan Kewarganegaraan, pengalaman belajar siswa dapat diperoleh dari kegiatan pengembangan kewarganegaraan dengan cara melibatkan diri dalam proses kegiatan pembuatan kebijakan publik.

Ketiga, pada saat siswa mengkaji berbagai masalah di masyarakat, mereka diberi kesempatan untuk berunding tentang berbagai ketegangan dalam praktek demokrasi, seperti ketegangan-ketegangan yang melibatkan hak-hak individu dan masalah kebijakan bersama, hak minoritas dan mayoritas, serta kebebasan dan persamaan. Berbagai ketegangan dan prinsip-prinsip demokrasi yang bersinggungan ini merupakan inti dari pengetahuan kewarganegaraan, yang memungkinkan Para siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan hidup efektif.

Keempat, model pembelajaran kewarganegaraan digunakan terutama oleh para siswa sekolah menengah atau remaja pada tahun-tahun awal (usia sekitar 10-15 tahun); namun dapat pula digunakan oleh siswa yang berusia lebih dari 15 tahun untuk sekolah tertentu. Selama di sekolah tersebut, para siswa berjuang membentuk identitas diri karena itu perlu diberi kesempatan untuk menjalin hubungan dengan masyarakatnya (CCE, 1999). Pada umumnya, anak pada usia muda berpikir dari konkrit ke abstrak dan seringkali mempertentangkan antara hal yang benar dan yang salah secara ekstrim, keabsahan kekuasaan, dan jawaban alternatif dalam menghadapi situasi yang sulit/dilematis. Selama masa remaja, siswa membentuk sikap dan meraih nilai-nilai yang mungkin akan mereka pegang

dalam kehidupannya. Siswa pada masa remaja cenderung punya rasa ingin tahu yang lebih tinggi tentang lingkungan sekitarnya, termasuk terhadap lingkungan hirup berkewarganegaraan; dan mereka membutuhkan pengalaman hidup di dunia nyata (*in the real world*) untuk mengkaji hubungannya dengan kehidupan berkewarganegaraan.

Kelima, model pembelajaran kewarganegaraan berbasis portofolio diterapkan kepada kaum muda sebagai sumber daya kewarganegaraan yakni sebagai anggota masyarakat berharga yang gagasan dan energinya dapat diterapkan untuk isu-isu kebijakan publik. Selain hanya mempersiapkan siswa yang akan berperan di masyarakat di kemudian hari, model pembelajaran ini mendorong agar mereka dapat berpartisipasi sebagai warga negara. Menurut para pengembang model pembelajaran ini, partisipasi yang dimaksud bukan hanya sebagai wahana yang baik untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan watak kewarganegaraan demokrasi, melainkan juga akan lebih baik bagi masyarakat karena selama proses kegiatan para siswa ikut membantu pihak pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui pemecahan masalah. Partisipasi dan pelibatan ini dimaksudkan untuk membantu kaum muda merasakan adanya keterkaitan mereka dengan masyarakat dan menyadari sumbangan mereka terhadap penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan.

4. Prinsip Dasar Model Pembelajaran Portofolio

Model Pembelajaran Berbasis Portofolio (MPBP) mengacu pada sejumlah prinsip dasar pembelajaran. Mengenai hal ini Kosasih Djahiri (2000:3) mengemukakan bahwa prinsip utama pembelajaran adalah proses keterlibatan

seluruh atau sebagian potensi diri siswa dan juga kebermaknaannya bagi diri sendiri maupun kehidupannya.

Dalam bukunya Dasim Budimansyah yang berjudul “Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio” (2002:8), beliau menyebutkan ada beberapa prinsip dasar model pembelajaran portofolio yaitu prinsip belajar siswa aktif (*student active learning*), kelompok belajar siswa aktif (*cooperative learning*), pembelajaran paraipatorik, dan mengajar yang reaktif (*reactive teaching*).

a. Prinsip Belajar Siswa Aktif

Proses pembelajaran dengan menggunakan Model Pembelajaran Berbasis portofolio (MPBP) berpusat pada siswa. Dengan demikian model ini menganut prinsip belajar siswa aktif. Aktivitas siswa hampir di seluruh kegiatan lapangan, dan pelaporan. Dalam fase perencanaan aktivitas siswa terlihat pada saat mengidentifikasi masalah dengan menggunakan teknik bursa ide (*brain storming*). Setiap siswa boleh menyampaikan masalah yang menarik baginya, di samping tentu saja yang berkaitan dengan materi pelajaran. Setelah masalah terkumpul, siswa melakukan *voting* untuk memilih satu masalah untuk kajian kelas.

Dalam fase kegiatan lapangan, aktivitas siswa lebih tampak. Dengan berbagai teknik (misalnya dengan wawancara, pengamatan, kuesioner, dan lain-lain) mereka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi kajian kelas mereka. Untuk melengkapi data dan informasi tersebut, mereka mengambil foto, membuat sketsa, membuat kliping, bahkan ada kalanya mengabadikan peristiwa penting dalam video.

Pada fase pelaporan aktivitas mereka terfokus Pada pembuatan portofolio kelas. Segala bentuk data dan informasi disusun secara sistematis dan disimpan pada sebuah bundel (portofolio seksi dokumentasi). Adapun data dan informasi yang paling penting dan menarik (*eyes catching*) ditempel pada portofolio seksi penayangan, yaitu papan panel yang terbuat dari kardus bekas atau bahan lain yang tersedia. Setelah portofolio selesai dibuat, dilakukanlah *public hearing* dalam kegiatan *show case* di hadapan dewan juri. Kegiatan ini merupakan puncak penampilan siswa, sebab segala jerih payah siswa diuji dan diperdebatkan di hadapan dewan juri.

b. Kelompok Belajar Kooperatif

Proses pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis portofolio juga menerapkan prinsip belajar kooperatif, yaitu proses pembelajaran yang berbasis kerjasama. Kerjasama antar siswa jelas terlihat pada saat kelas sudah memilih satu masalah untuk bahan kajian bersama. Semua pekerjaan disusun, orang-orangnya ditentukan, siapa mengerjakan apa, merupakan satu bentuk kerjasama itu.

c. Pembelajaran Partisipatorik

Model Pembelajaran Berbasis Portofolio juga menganut prinsip dasar pembelajaran partisipatorik, sebab melalui model ini siswa belajar sambil melakoni (*learning by doing*). Salah satu bentuk pelakonan itu adalah siswa belajar hidup berdemokrasi. Sebagai contoh pada saat memilih masalah untuk kajian kelas memiliki makna bahwa siswa dapat menghargai dan menerima pendapat yang didukung suara terbanyak. Pada saat berlangsungnya perdebatan,

siswa belajar mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menyampaikan kritik dan sebaliknya belajar menerima kritik, dengan tetap berkepala dingin. Oleh karena itu, mengajarkan demokrasi itu harus dalam suasana yang demokratis dan untuk mendukung kehidupan yang demokratis.

d. *Reactive Teaching*

Untuk menerapkan model ini, guru perlu menciptakan strategi yang tepat agar siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Motivasi yang seperti itu akan dapat tercipta kalau guru dapat meyakinkan siswa akan kegunaan materi pelajaran bagi kehidupan nyata. Demikian juga, guru harus dapat menciptakan situasi sehingga materi pelajaran selalu menarik, tidak membosankan. Guru harus punya sensitifitas yang tinggi untuk segera mengetahui apakah kegiatan pembelajaran sudah membosankan siswa. Jika hal ini terjadi, guru harus segera mencari cara untuk menanggulangnya. Inilah tipe guru yang reaktif.

Ciri guru yang reaktif itu diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan belajar.
- 2) Pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang sudah diketahui dan dipahami siswa.
- 3) Selalu berupaya membangkitkan motivasi belajar siswa dengan membuat materi pelajaran sebai sesuatu hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan siswa.
- 4) Segera mengenali materi atau metode pembelajaran yang membuat siswa bosan. Bila hal ini ditemui, ia segera menanggulangnya.

5. Sifat-sifat Model Pembelajaran Portofolio

Mengenai sifat-sifat dari pembelajaran portofolio dikemukakan oleh Kosasih Djahiri (2000: 6-7) bahwa sifat-sifat dari pembelajaran portofolio itu diantaranya:

a. Aktif dan *meaningfull*

Sebagian besar potensi belajar yang ada dalam diri siswa baik itu potensi kognitif, afektif dan psikomotor dengan taksonomi yang tinggi terlibat dan berproses. Melalui proses pembelajaran ini diraih perolehan basil belajar yang utuh bulat yakni pelatihan dan pengembangan berbagai potensi dan keterampilan belajar siswa, substansi ajar utuh berupa data fakta, konsep, teori, hukum berikut nilai moral, serta tata cara aturan main pelaksanaan. Pembelajaran juga diharapkan dapat *meaningfull* dalam artian berguna, bermanfaat dan menjadi milik siswa sepenuhnya (*self concept*). Dalam kaitannya dengan pembelajaran *meaningfull*, Charles B. Myer (Kosasih Djahiri, 2002: 14) mengemukakan bahwa pembelajaran akan *meaningfull* apabila:

Knowledge, skill, believe, values and aptitude yang dipelajari berguna bagi diri dan kehidupan pendalaman materi difokuskan pada terciptanya *understanding, appreciation and life application*, pembelajaran tidak hanya pembekalan tetapi juga berupa kegiatan, kegiatan belajar dan penilaian berfokus pada perolehan siswa, pembelajaran sesuai dan menjawab kebutuhan dan permasalahan siswa, sesuai dengan tingkat dan perkembangan siswa.

b. *Inquiry Learning* atau *Problem Solving*

Lingkungan belajar sekitar siswa menyediakan fenomena hidup yang menarik. Siswa sebagai ilmuan muda mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Pendekatan pembelajaran hendaknya keingintahuan siswa dan memotivasinya

sehingga mendorong mereka untuk mengajukan beragam pertanyaan seperti apa, mengapa dan bagaimana tentang objek dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Di samping itu pembelajaran harus juga melatih dan membiasakan siswa untuk mahir dalam memecahkan berbagai persoalan. Mereka dapat memecahkan masalah dengan menggunakan langkah yang sistematis dari mulai mengidentifikasi masalah sampai dengan membuat suatu alternatif pemecahan yang tepat.

c. *Integrated Learning*

Integrated learning dapat diartikan sebagai belajar terpadu, apa yang dipelajari atau dilakoni bersifat komprehensif dan utuh bulat tidak, parial. Bahan ajar dan kegiatan belajar bersifat multidimensional namun merupakan satu kesatuan yang utuh. Dimensi keilmuan dipadukan dengan dimensi kehidupan nyata, demikian halnya pembelajaran berlangsung di kelas dan di luar kelas. Dalam kaitannya dengan *integrated learning*, C.B. Myer (Kosasih Djahiri, 2002: 6) mengemukakan ciri-ciri pembelajaran *integrated* diantaranya “konsep atau topik diajarkan lintas disiplin, merambah lintas waktu dan tempat, mampu mengaitkan (*knowledge, skill, beliefs, values and attitudes*), memberdayakan IPTEK secara efektif, dikaitkan dengan pelajaran lainnya”.

Jadi sebuah pembelajaran yang *integrated* adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan interdisipliner, multidimensi dan juga tidak terpaku pada materi yang bersifat teoritik saja melainkan juga mengembangkan materi secara meluas mencakup kehidupan nyata dari siswa.

d. *Cooperative Group Learning*

Cooperative group learning yaitu suatu bentuk kegiatan belajar yang bersifat kooperatif dimana seluruh anggota merupakan satu kesatuan yang penuh solidaritas, saling menolong dan saling membantu keberhasilan belajar masing-masing siswa. Segala pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan voting (suara terbanyak).

e. *Student Based*

Student based artinya siswa dan kemampuan dari kondisi fisik maupun non fisik serta lingkungan belajarnya akan menjadi acuan mulai dari bahan ajar sampai dengan penilaian.

f. *Factual Based*

Bahwa bahan ajar jangan hanya bersifat teoritik, konseptual. Pembelajaran tidak dilakukan dengan mono sumber, mono media dan mono evaluasi. Di dalam pembelajaran memuat pula realita kehidupan baik kemarin, kini maupun esok. Kegiatan belajar siswa identik dengan partisipasi dan pelatihan dalam realita kehidupan yang kini dan esok dilakoninya.

g. *Democratic, Humanistic* dan Terbuka

Demokratik, humanistik dan terbuka artinya di dalam pembelajaran siswa dihargai sebagai manusia yang memiliki berbagai potensi diri, bisa melakukan berbagai pilihan dan berproses aktif. Siswa tidak dianggap sebagai orang yang bodoh namun seorang guru harus dapat menghargai *entry behaviour* siswa. Hubungan antara guru dan siswa terjalin dengan harmonis guru di kelas

diibaratkan sebagai partner belajar siswa. Dan satu hal lagi penilaian dilakukan dengan menjunjung prinsip keadilan dan keterbukaan (transparan).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran portofolio adalah pembelajaran yang mengintegrasikan pengembangan berbagai jenis bahan ajar, metode, media dan sumber belajar secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya menjadi sebuah pembelajaran yang kompleks. Di dalam pembelajaran portofolio juga menempatkan siswa sebagai pelaku utama di dalam belajar.

6. Langkah-langkah Model Pembelajaran Portofolio

Model pembelajaran berbasis portofolio melibatkan siswa dalam sebuah proses pembelajaran baik secara fisik dan mental. Untuk melakukan proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara keseluruhan terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh. Adapun langkah-langkah model pembelajaran berbasis portofolio menurut *Center for Civic Education* yang dikutip oleh Arnie Fajar (2002, 55-76) yaitu sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi masalah.
- b. Memilih salah untuk dikaji.
- c. Mengumpulkan informasi yang dikaji oleh kelas.
- d. Mengembangkan portofolio kelas.
- e. Penyajian portofolio atau *show case*.
- f. Merefleksikan pengalaman belajar.

Langkah 1: Mengidentifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu proses mempelajari, mengkaji dan meneliti berbagai permasalahan yang ada di sekitar lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru. Pada tahap ini terdapat beberapa

kegiatan yang dilakukan guru bersama siswa yaitu mendiskusikan tujuan, mencari masalah, apa saja yang siswa ketahui tentang masalah di masyarakat dan memberi tugas Pekerjaan Rumah tentang masalah yang ada di lingkungan masyarakat yang mereka anggap sangat penting sesuai dengan kepentingan siswa, seperti:

- a. masalah umum di masyarakat,
- b. masalah-masalah di sekolah,
- c. masalah-masalah yang menyangkut standar masyarakat,
- d. masalah-masalah lingkungan, dan
- e. masalah-masalah yang berkaitan dengan usia anak muda, dan lain-lain.

Dalam mengerjakan Pekerjaan Rumah tersebut, siswa diharapkan untuk mencari informasi tentang masalah yang akan dikaji dengan cara:

- a. mewawancarai orangtua/keluarga, teman, tetangga, dan orang lain yang dianggap menguasai masalah yang akan dikaji,
- b. melalui sumber-sumber cetak seperti majalah, koran dan tabloid, dan
- c. melalui elektronika seperti radio, TV dan internet.

Semua informasi yang diperoleh harus dicatat untuk didiskusikan di kelas, informasi yang dicatat merupakan deskripsi/gambaran atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Isu atau masalah apakah yang dianggap penting saat ini dan segera mendapatkan penanganan dari individu/masyarakat pemerintah?
- b. Mengapa masalah tersebut merupakan masalah yang dianggap penting oleh kalian/masyarakat?

- c. Kebijakan apakah saat ini dimiliki pemerintah/lembaga pemerintah atau swasta/masyarakat?
- d. Apakah kepentingan dari kebijakan tersebut?
- e. Apakah kekurangan dari kebijakan tersebut?
- f. Apakah kebijakan tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini?
- g. Apakah kebijakan tersebut perlu diperbaiki dan bagaimana caranya?
- h. Apakah kebijakan tersebut perlu diganti, mengapa dan bagaimana caranya?
- i. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut?
- j. Siapakah (individu, kelompok, lembaga pemerintah/swasta) yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut?
- k. Apakah yang mereka lakukan berkenaan dengan masalah tersebut?
- l. Dari mana saya dapat memperoleh informasi lebih banyak mengenai masalah tersebut?

Langkah II: Memilih Masalah Untuk Kajian Kelas

Sebelum memilih masalah yang akan dipelajari oleh para siswa harus mengkaji terlebih dahulu pengetahuan yang telah mereka miliki tentang masalah di masyarakat, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengkaji informasi yang akan dikumpulkan dan memilih satu masalah yang dianggap paling penting. Dalam langkah ini guru memberikan bimbingan pada siswa pada saat mendiskusikan hasil belajar siswa yang diperoleh dari Pekerjaan Rumah pada tahap pertama, dan
- b. mengadakan pemilihan secara demokratis tentang masalah yang mereka kaji dengan cara memilih satu masalah. Pemilihan dapat dilakukan secara

musyawarah atau pengambilan suara. Pemilihan masalah bisa dilakukan dengan cara menuliskan terlebih dahulu daftar masalah di papan tulis, baru kemudian siswa diarahkan untuk memilih satu masalah yang dianggap penting dengan cara mengumpulkan kertas yang telah diisi dengan pilihan mereka, atau juga bisa ke depan satu persatu dan memilih satu masalah yang telah diajukan kelasnya.

Langkah III: Mengumpulkan Informasi yang Akan Dikaji Oleh Kelas

Setelah kelas memilih satu masalah yang perlu dikaji, maka selanjutnya siswa mengumpulkan informasi tambahan yang akan digunakan dalam pengembangan portofolio. Pada tahap ini guru berperan sebagai pembimbing siswa dalam mendiskusikan sumber-sumber informasi yang berkenaan dengan masalah yang dikaji. Adapun kegiatan yang harus dilakukan siswa dan guru dalam tahapan ini diantaranya:

a. Mengidentifikasi sumber-sumber informasi

Untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang sedang dikaji siswa perlu mengidentifikasi masalah, sumber-sumber informasi mana saja yang akan memberi banyak informasi dan sumber-sumber mana saja yang kurang. Di samping itu sebelumnya harus diidentifikasi pada tingkat kesulitan menjangkau sumber-sumber informasi dan prasyarat yang diminta agar dapat memperoleh informasi yang memadai. Pada kegiatan ini guru mengarahkan siswa dalam mendiskusikan sumber informasi berkenaan dengan masalah yang dikaji.

b. Panduan untuk memperoleh dan mendokumentasikan informasi

Dalam kegiatan ini ada beberapa langkah untuk mencari informasi di lapangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengunjungi perpustakaan atau tempat lain untuk mendapatkan informasi dengan berbekal surat tugas dari kepala sekolah,
- 2) Menghubungi sumber-sumber informasi melalui telepon,
- 3) Membuat janji dan mewawancarai orang sumber, dan
- 4) Meminta informasi lewat surat.

c. Tugas Pekerjaan Rumah

Setelah menetapkan sumber-sumber informasi yang akan dimanfaatkan, kemudian kelas dibagi ke dalam tim-tim peneliti. Setiap tim bertanggung jawab mengumpulkan informasi dari sumber yang berbeda.

Langkah IV : Membuat Portofolio Kelas

Pada tahap ini hendaknya telah menyelesaikan penelitian yang memadai untuk memulai membuat portofolio kelas. Selanjutnya yang harus ditempuh pada tahap ini adalah sebagai berikut yaitu:

- a) Kelas dibagi dalam empat kelompok dan setiap kelompok akan bertanggung jawab untuk membuat satu bagian portofolio.
- b) Guru mengulas tugas-tugas rincian untuk portofolio.
- c) Guru menjelaskan bahan informasi yang dikemukakan oleh tim-tim penelitian seringkali akan bermanfaat bagi lebih dari satu kelompok portofolio. Jika satu dua kelompok memiliki seluruh informasi yang diperlukan untuk mengerjakan

tugasnya, maka guru atau siswa lain hendaknya membantu kelompok bagaimana cara mendapatkan informasi.

d) Guru menjelaskan spesifikasi portofolio yakni terdapat bagian penyangan dan bagian dokumentasi sebagai berikut:

- 1) Seksi penyangan, merupakan bagian portofolio yang disusun untuk dipamerkan pada yang hadir. Bagian ini memberikan tinjauan tentang seluruh portofolio yang ditampilkan dalam empat lembar papan poster dan papan biasa. Masing-masing papan poster yang ideal kira-kira berbentuk persegi panjang dengan 90 cm dan lebar 75 cm. Ke empat papan itu satu sama lain direkat sehingga dapat diletakkan di atas meja. Bahan-bahan yang ditayangkan dapat meliputi pernyataan-pernyataan tertulis, daftar sumber, peta, grafik, foto, karya seni asli dan lain-lain.
- 2) Seksi dokumentasi, merupakan bagian portofolio yang berisi catatan terpilih serta makalah asli dari hasil kedua tim peneliti. Dengan kata lain bagian portofolio terdiri atas bagian-bagian yang terkumpul yang memberi bukti hasil penelitian. Bahan-bahan yang di dokumentasikan tersebut harus mewakili contoh-contoh.

Langkah V: Penyajian Portofolio Kelas (*show case*)

Setelah portofolio kelas dibuat, siswa dapat menyajikan kegiatan *show case* atau gelar kasus dihadapan dewan juri. Dewan juri ini terdiri dari tiga atau empat orang tokoh yang mewakili sekolah dan masyarakat. Yang dikutip Dasim Budimansyah (2002:62) mengemukakan tujuan pokok dari *show case* yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menginformasikan pada hadirin pentingnya masalah yang diidentifikasi masyarakat.
- b. Untuk menjelaskan dan mengevaluasi kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah sehingga hadirin dapat memahami keuntungan dan kerugian dari setiap, kebijakan tersebut.
- c. Untuk mendiskusikan kebijakan yang dipilih kelas sebagai kebijakan terbaik untuk mengatasi masalah.
- d. Untuk membuktikan bagaimana kelas dapat menumbuhkan dukungan dalam masyarakat, lembaga legislatif dan eksekutif yang terkait dengan penyusunan kebijakan publik.

Pada langkah penyajian portofolio, terdapat dua kegiatan inti yaitu:

a. Pembuatan penyajian lisan

Pada kegiatan ini setiap kelompok menyajikan secara lisan informasi yang paling bermakna dari bagian portofolionya yang disajikan selama dua puluh menit. Pada saat penyajian ini siswa diharapkan dapat memperhatikan hal-hal di bawah ini:

- 1) Penyajian berdasarkan pada seksi tayangan dan dokumentasi portofolio, tetapi dianjurkan untuk tidak dibaca kata demi kata dari tayangan tersebut.
- 2) Gunakan grafik-grafik dari portofolio untuk membantu peserta didik menjelaskan atau menekankan satu hal yang terpenting.

b. Pernyataan lanjutan

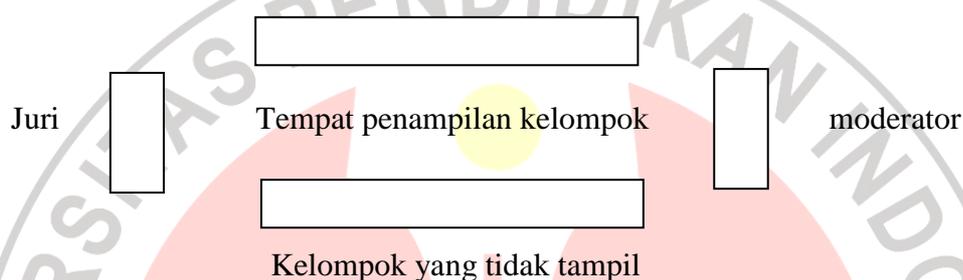
Setelah kelompok menyajikan hasil kerjanya, kemudian dua puluh menit selanjutnya merupakan forum tanya jawab antara penyaji dengan para penilai atau juri tentang penyajian portofolio. Selama kegiatan ini, para penilai dapat meminta panyaji untuk:

- 1) Menjelaskan lebih jauh mengklarifikasi pokok-pokok utama yang dikerjakan peserta didik.

- 2) Memberikan contoh pokok utama yang dibuat oleh siswa.
- 3) Mempertahankan beberapa pernyataan atau pendirian sikap siswa.
- 4) Menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pengalaman siswa dalam membuat portofolio kelas.

Di bawah ini digambarkan denah lokasi pelaksanaan penyajian (*show case*)

portofolio:



Gambar 2.1
Denah Pelaksanaan Portofolio

Langkah IV : Refleksi Pengalaman Belajar

Merefleksikan artinya bercermin, maknanya adalah bercermin pada pengalaman belajar yang baru saja dilakukan oleh siswa baik secara perorangan maupun kelompok. Dalam kegiatan refleksi ini siswa diajak untuk melakukan evaluasi tentang apa dan bagaimana mereka belajar. Tuntutan dari refleksi ini yaitu untuk belajar menghindari kesalahan di masa yang akan datang dan untuk meningkatkan kinerja siswa. Dalam merefleksikan pengalaman belajar siswa, guru melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh siswa telah mempelajari berbagai hal yang berkenaan dengan topik yang dipelajari sebagai upaya belajar secara kooperatif. Panduan untuk merefleksikan pengalaman siswa dapat dilakukan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Melalui kerjasama dengan teman sekelas, apakah yang telah saya pelajari tentang cara membuat suatu kebijakan untuk mengatasi masalah?
- b. Apakah yang telah kelas kami pelajari tentang cara-cara pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah melalui pembuatan portofolio?
- c. Keterampilan apa yang telah saya/kami pelajari melalui kegiatan ini?
- d. Apa keuntungan bekerja dalam tim?
- e. Apakah yang telah saya/kami lakukan dengan baik?
- f. Bagaimana saya dapat meningkatkan keterampilan memecahkan masalah?
- g. Bagaimana kami dapat meningkatkan keterampilan memecahkan masalah?
- h. Apakah yang ingin kami takukan secara berbeda, seandainya membuat portofolio lain pada masa yang akan datang?

Hasil refleksi pengalaman belajar tersebut dimasukkan sebagai bab kelima portofolio seksi dokumentasi. Karena hasil refleksi terdiri atas refleksi secara individu dan kelas, maka hasil refleksi tersebut diletakkan secara terpisah.

7. Evaluasi dan Penilaian Model Pembelajaran Portofolio

Penilaian atau evaluasi bagian dari proses pembelajaran. Penilaian ini dapat dilakukan di awal, tengah atau dalam proses pembelajaran. Karena evaluasi merupakan bagian dari proses pembelajaran dan bersifat reduksi, maka proses penilaian diharapkan tidak hanya dilakukan satu atau dua kali saja melainkan harus dilakukan sebelum dan sepanjang proses pembelajaran melalui berbagai pola dan model, alat serta kegiatan secara terarah dan terkendali. Azis Wahab (1992:2) mendefinisikan portofolio penilaian sebagai sebuah laporan tentang

proses belajar peserta didik atau orang lain tentang upaya atau hasil yang telah dicapai dalam satu atau lebih bidang.

Sedangkan Sapriya (2002:211) mengemukakan penilaian portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan keterangan yang tersusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan peserta didik untuk menilai pertumbuhan *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keterampilan) dan *attitudes* (perilaku) para peserta didik dalam mata pelajaran tertentu.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa penilaian portofolio merupakan hasil laporan tentang proses kegiatan belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru dan peserta didik secara berkesinambungan yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan peserta didik selama proses pelajaran berlangsung yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotor. Dengan penilaian portofolio ini guru dapat mengetahui letak kekurangan dan kelebihan peserta didiknya sehingga memudahkan untuk membantu dan mengarahkan peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar.

Model penilaian portofolio mengacu pada beberapa prinsip dasar penilaian. Dasim Budimansyah (2002:112-116) mengemukakan beberapa prinsip dasar penilaian portofolio antara lain:

a. Prinsip Penilaian dan Hasil

Model penilaian portofolio menerapkan prinsip penilaian proses dan hasil sekaligus. Proses belajar yang dinilai misalnya dari catatan perilaku harian mengenai sikap dalam belajar. Aspek lain dari penilaian proses misalnya menilai

tugas-tugas terstruktur dari guru. Penilaian proses dapat dilakukan terhadap laporan aktivitas siswa di luar kelas.

b. Prinsip Penilaian Berkala dan Berkesinambungan

Model penilaian berbasis portofolio menerapkan penilaian berkala. Dalam menilai hasil misalnya secara berkala setiap selesai satu tahun pelajaran diadakan ulangan atau tes formatif dan setiap akhir semester. Dalam menilai proses misalnya tugas terstruktur diberikan setiap satu satuan pelajaran, catatan anekdot secara berkala direkap tiap mingguan dan laporan aktivitas siswa di luar sekolah secara berkala direkap setiap bulan. Model penilaian portofolio juga menerapkan prinsip penilaian berkesinambungan sebagaimana diungkapkan oleh Kosasih Djahiri (2002:2) bahwa evaluasi portofolio merupakan penilaian yang kontinyu atau berkesinambungan seiring dengan rentangnya kegiatan siswa sehingga bersifat kumulatif dan bersifat terbuka. Dari uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa selain penilaian berkala dalam portofolio terdapat juga penilaian berkesinambungan, maksudnya penilaian ini dilakukan secara terus menerus mengikuti kegiatan peserta didik sehingga nilai-nilai yang diperoleh pun merupakan akumulasi dari hasil kerja siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

c. Penilaian Benar-benar Memperhatikan Peserta Didik

Penilaian portofolio benar-benar memperhatikan keadaan siswa sehingga nilai yang diberikan sesuai dengan kemampuan siswa tersebut seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa penilaian portofolio dilakukan secara berkala dan

berkesinambungan dengan demikian maka seluruh kemampuan siswa benar-benar dinilai secara adil pada akhirnya semua pihak dapat menjadi puas dan tidak ada pihak yang dirugikan.

d. Prinsip Penilaian Implikasi Belajar

Model pembelajaran portofolio tidak hanya terbatas pada penilaian kognitif atau pengetahuan saja tetapi juga penilaian sikap dan keterampilan peserta didik. Karena selama proses pembelajaran siswa tidak hanya belajar teori saja tapi juga praktek sehingga memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman bagi kehidupannya kelak.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa penilaian portofolio merupakan salah satu alternatif penilaian yang dikembangkan dengan harapan dapat menciptakan suatu alat penilaian yang dapat mengukur perkembangan siswa secara menyeluruh sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari siswa. Di samping itu penilaian portofolio dapat mendorong siswa untuk aktif terlibat langsung dalam proses pembelajaran guna memperoleh nilai tambah bagi dirinya, karena model penilaian ini bersifat terbuka untuk perbaikan.

8. Contoh Sumber Informasi dalam Portofolio

a. Perpustakaan

Perpustakaan sekolah, umum, dan universitas menyediakan surat kabar dan publikasi lainnya yang memuat informasi tentang masalah yang sedang diteliti. Kalau ingin memfotokopi informasi tersebut.

b. Kantor Surat Kabar

Para siswa dapat menghubungi kantor-kantor surat kabar. Di sana para wartawan surat kabar bertugas mengumpulkan informasi tentang masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat serta mencari informasi tentang sikap pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Kantor-kantor surat kabar dan para wartawan mungkin dapat memberikan kliping tentang masalah yang sedang siswa pelajari.

c. Profesor dan Pakar

Profesor dan dosen di perguruan tinggi/universitas yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dapat dijadikan sumber informasi. Para siswa bisa mencari alamat mereka dari buku telepon. Atau dapat menghubungi perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mendapat bantuan dari para ahli. Para siswa boleh juga menghubungi guru-guru SD, SMP, atau SMU yang ada di sekitar sekolah atau tempat tinggal para siswa.

d. Ahli Hukum dan Hakim

Para ahli hukum memiliki perkumpulan pengacara yang memberikan pelayanan cuma-cuma bagi masyarakat, misalnya LBH (Lembaga Bantuan Hukum). Selain itu para siswa bisa juga menghubungi para hakim atau penasihat hukum. Mereka merupakan sumber informasi yang akurat. Siswa dapat menggunakan buku telepon untuk menemukan alamat asosiasi pengacara yang terdekat.

e. Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat di Indonesia cukup banyak ditemukan. Contohnya adalah organisasi PKK untuk ibu rumah tangga, atau. KNPI yaitu organisasi

pemuda. Organisasi masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari sebenarnya juga sudah dicatat pada saat para siswa mengerjakan pekerjaan rumah yang pertama.

f. Kantor Legislatif dan Kantor Pemerintahan Daerah

Wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif dan kantor pemerintahan daerah baik pusat maupun daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat. Mereka juga berkewajiban untuk membuat kebijakan publik untuk menangani masalah yang telah diidentifikasi. Biasanya di kantor tersebut akan ada petugas yang bertanggung jawab membantu siapa saja dalam memperoleh informasi tentang masalah-masalah dalam masyarakat.

g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Orang-orang yang bekerja pada LSM-LSM juga dapat membantu memberikan informasi bagi kajian masalah kelas. Pihak LSM tersebut dapat memahami berbagai masalah yang ada di masyarakat dan berperan aktif dalam usaha menanggulangnya.

h. Kantor Polisi

Salah satu tugas polisi adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, jika masalah yang sedang diteliti membutuhkan beberapa informasi dari pihak kepolisian, maka para siswa bisa menghubunginya.

i. Jaringan Informasi Elektronik

Sumber-sumber di atas juga dapat ditemukan melalui internet. Apabila sekolah tidak mempunyai akses terhadap pelayanan ini, para siswa dapat pergi ke warnet (Warung Internet) yang menyediakan jasa penyewaan pemakaian internet.

9. Kriteria Penilaian Portofolio

a. Kriteria bagi tiap-tiap bagian portofolio:

1) Kelengkapan

- Apakah masing-masing bagian telah mencakup bahan-bahan yang diuraikan di muka menurut tugas masing-masing kelompok portofolio 1-4?
- Apakah bahan-bahan yang sudah dimasukkan melebihi dari yang diperlukan?

2) Kejelasan

- Apakah portofolio tersusun dengan rapi?
- Apakah portofolio tertulis dengan jelas dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD (Ejaan Yang Disempumakan)?
- Apakah hal-hal pokok dan argumen-argumen yang dimasukkan adalah hal-hal dan argumen-argumen yang mudah dipahami?

3) Informasi

- Apakah informasi akurat?
- Apakah informasi sudah mencakup fakta utama dan konsep-konsep penting?

- Apakah informasi-informasi yang dimasukkan adalah informasi penting yang dapat mempermudah memahami topik portofolio?

4) Hal-hal yang mendukung

- Apakah para siswa telah memberikan contoh-contoh yang dapat memperjelas atau mendukung hal-hal utama?

5) Grafis

- Apakah grafis yang ditayangkan berkaitan erat dengan isi bagian yang ditampilkan? Apakah grafis cukup memberikan informasi? Apakah masing-masing grafis telah memiliki judul? Apakah grafis dapat membantu orang lain memahami tayangan portofolio kelas?

6) Dokumentasi

- Apakah para siswa telah mendokumentasikan hal-hal terpenting pada bagian portofolio?
- Apakah kelas telah menggunakan sumber-sumber yang tepat, terpercaya dan variatif?
- Pada saat mengutip atau menyadur pernyataan dari nara sumber, apakah selalu menghargai mereka?
- Apakah bagian portofolio dokumentasi berkaitan erat dengan bagian portofolio tayangan?
- Apakah para siswa telah memilih sumber informasi yang terbaik dan terpenting?

7) Konstitusionalitas

- Apakah Format Landasan Konstitusional telah dimasukkan? Apakah para siswa telah menjelaskan mengapa kebijakan yang diusulkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?

b. Kriteria keseluruhan portofolio:

1) Persuasif

- Apakah portofolio kelas dapat memberikan bukti yang cukup bahwa masalah yang dipilih sebagai bahan kajian kelas itu adalah masalah yang penting?
- Apakah kebijakan yang diusulkan sudah mengarah langsung pada pokok permasalahan?
- Apakah portofolio kelas dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana cara kelas mendapatkan dukungan publik atas kebijakan yang telah diusulkan?

2) Kegunaan

- Apakah usulan kebijakan kelas itu praktis dan realistis?
- Apakah rencana kerja kelas untuk memperoleh dukungan bagi usulan kebijakan sudah bersifat realistis?

3) Koordinasi

- Apakah tiap-tiap bagian dari keempat bagian portofolio tayangan saling berkaitan satu sama lain tanpa adanya pengulangan informasi?
- Apakah Bagian Dokumentasi portofolio kelas dapat memberikan bukti-bukti yang mendukung Portofolio Bagian Tayangan?

4) Refleksi

- Apakah Bagian Refleksi dan Evaluasi pengembangan portofolio kelas dapat menunjukkan bahwa para siswa telah merenungkan semua pengalaman yang didapat?
- Apakah para siswa telah menuliskan semua yang telah dipelajarinya dari pengalaman pembuatan portofolio kelas?